No. 172 Juni - Juli 2020

Bakti.or.id Bakti.or.id

MEMAHAMI KTI DENGAN SEKSAMA



PORTAL ANALISIS DATA BERBASIS PETA (PANADA) UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KOTA MANADO

TIDAK DIPERJUALBELIKAN NOT FOR SALE

NORMA GENDER BERPENGARUH TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI?





ISSN 1979-777X www.bakti.or.id Penanggung Jawab M. YUSRAN LAITUPA ZUSANNA GOSAL

Editor VICTORIA NGANTUNG ITA MASITA IBNU

Events at BaKTI SHERLY HEUMASSE

Praktik Cerdas & Info Buku SUMARNI ARIANTO Database & Sirkulasi FADHILAH MANSYUR Design & Layout

Editor Foto ICHSAN DJUNAED

201

Redaksi

Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia **+62 4**11 832228. 833383 +62 411-852146 Email info@bakti.or.id atau baktinews@bakti.or.id SMS BaKTINews 0813 4063 4999, 0815 4323 1888, 0878 4000 0

> Facebook www.facebook.com/yayasanbakti Twitter @InfoBaKTIInstagram @InfoBaKTI

BaKTINews adalah media pertukaran pengetahuan tentang pembangunan di Kawasan Timur Indonesia. Tujuan BaKTINews adalah mempromosikan praktik cerdas pembangunan dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia agar dapat diketahui oleh khalayak luas dan menginspirasi pelaku pembangunan di berbagai daerah dalam upaya menjawab berbagai tantangan pembangunan. BaKTINews terbit setiap bulan dalam dua bahasa, Indonesia dan lnggris, untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan informasi pembangunan dari Kawasan Timur Indonesia.

BaKTINews disirkulasi melalui pos kepada pembaca dengan target utama adalah para pelaku pembangunan yang berdomisili di daerah kepulauan dan daerah terpencil. Tidak dikenakan biaya apapun untuk berlangganan BaKTINews agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses informasi pembangunan melalui majalah ini. Selain dalam bentuk cetak, BaKTINews juga dapat diakses di website BaKTI: www.bakti.or.id dan dikirimkan melalui email kepada pelanggan yang dapat mengakses internet.

BaKTINews dikelola oleh Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Seluruh artikel BaKTINews adalah kontribusi sukarela para pelaku pembangunan dari berbagai kalangan dan daerah yang ingin berbagi pengetahuan dengan khalayak luas.

BaKTINews is a knowledge exchange media platform for development issues in eastern Indonesia. BaKTINews aims to promote development smart practices from different regions in eastern Indonesia so that the practices become known to a wider audience and inspire development stakeholders in other regions in their efforts to answer development challenges. BaKTINews is published monthly in two languages, Indonesian and English, to facilitate readers who don't understand indonesian to gain a better understanding of development in eastern Indonesia.

BaKTINews is sent by post to readers and the main target is development stakeholders living in isolated regions and island regions. BaKTINews is provided free of charge so the development community can access relevant development information easily. BaKTINews is also provided in an electronic version that can be accessed on www.bakti.or.id and can be sent electronically to subscribers with internet access.

BaKTINews is managed by the Eastern Indonesia Knowledge Exchange (BaKTI). All articles are contributed voluntarily by development stakeholders from different areas in eastern Indonesia who wish to share their information with a wider audience.

BERKONTRIBUSI UNTUK BaKTINews Contributing to BaKTINews

BaKTINews menerima artikel tentang kemajuan pembangunan, pembelajaran dari suatu kegiatan, praktik cerdas pembangunan, hasil-hasil penelitian yang dapat diaplikasikan, dan teknologi tepat guna dari berbagai daerah di Kawasan Timur Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua).

Panjang artikel adalah 1.000 - 1.100 kata,menggunakan Bahasa Indonesia maupun lnggris, ditulis dengan gaya populer. Foto-foto penunjang artikel sangat dibutuhkan. Tim editor BaKTINews akan melakukan edit terhadap setiap artikel yang akan dimuat untuk kesesuaian tempat dan gaya bahasa. Redaksi BaKTINews tidak memberikan imbalan kepada penulis untuk setiap artikel yang dimuat

BaKTINews accepts articles about development programs, lessons learnt from an activity, development smart practices, research results that can be applied, and applied technology from different stakeholders and regions in eastern Indonesia (Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, and Papua). Articles should be 1,000-1, 100 words, in either Indonesian or English, and written in a popular style.

Articles should also be sent with photos that illustrate the article. The editors of BaKTINews will edit every article for reasons of space and style. BaKTINews does not provide payment to writers for articles

MENJADI PELANGGAN BaKTINews Subscribing to BaKTINews

Untuk berlangganan BaKTINews, silahkan mengirimkan data diri anda (organisasi, posisi, nomor HP, alamat email) lengkap dengan alamat lengkap yang disertai dengan kode pos melalui email baktinews@bakti.or.id.

Bagi yang berdomisili di Makassar, Anda dapat mengambil BaKTINews di Display Corner Gedung BaKTI pada setiap hari kerja.

To subscribe to BaKTINews please send us your full contacts details (including organization. position, HP number and email address) with full postal address to baktinews@bakti.or.id.

For those living in Makassar, please stop by the BaKTI office and pick up your copy from the display corner from Monday to Friday.

Daftar Isi

BaKTINews

Juni - Juli 2020

No. 172

- Rumah Isolasi Mandiri Bagi Perempuan Oleh SOFIA SIAHAYA &
 - Oleh SOFIA SIAHAYA & JEMMY TALAKUA
- Meki Nawipa: "Saya Ingin Lihat Anak Asli Paniai Menggantikan Kami"
 - Oleh SYAIFULLAH & DESI MUTIALIM
- **9** Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA) untuk Perencanaan Pembangunan di Kota Manado Oleh **SUMARNI ARIANTO**
- 14 Kebijakan Berbasis Pengetahuan: Pengarusutamaan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan di Sulawesi Selatan
 - Oleh RAHMAD SABANG
- **17** Selamatkan Anak Rentan Melalui Layanan Puskesos Sebagai *Service Hub* PKSAI
 - Oleh ARAFAH

- **21** Kurma Lastri untuk Kesehatan Lansia
 - Oleh dr. NURMAWARID
- 25 Perencanaan Tersinergi di Kampung Marsi Oleh HALIA ASRIYANI
- 29 Norma Gender Berpengaruh Terhadap Kesehatan Reproduksi? Oleh MEGA S HARUNA
- **32** Inovasi Pelayanan Publik, Bukti Hadir Pemerintah Oleh FADIAH MACHMUD
- **37** Pengembangan Modal Manusia Adalah Kunci Masa Depan Indonesia Oleh **CAMILLA HOLMEMO**
- 40 Diskusi Online di BaKTI
- **41** BaKTI's Corner Hadir di Perpustakaan Kota Makassar
- Foto Cover: Yusuf Ahmad/KOMPAK





Rumah Isolasi Mandiri **Bagi** Perempuan

Oleh **SOFIA SIAHAYA & JEMMY TALAKUA**

andemi COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 mengubah kehidupan sosial masyarakat di seluruh dunia. Masyarakat diminta untuk menjaga jarak (physical distancing), melakukan pembatasan sosial (social distancing), bekerja di rumah (work from home), hingga rumah-rumah ibadah pun harus ditutup sementara untuk memutus

rantai penyebaran virus.



Meski awalnya ditentang warga, Perpustakaan Hatukau akhirnya dapat dimanfaatkan menjadi Rumah Isolasi Mandiri bagi Perempuan Pelaku Perjalanan. berkat pendekatan dan sosialisasi yang baik kepada warga.

Foto: Dok. Yayasan Arika Mahina

Kota Ambon terus aktif melakukan upaya pencegahan dan penanganan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 melalui mekanisme dan penerapan protokol kesehatan secara wajib bagi semua masyarakat.

Untuk memastikan semua langkah yang dimaksud efektif diterapkan dibentuk juga satuan tugas (satgas) atau Relawan Penanganan dan Pencegahan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan dengan melibatkan berbagai organisasi dan elemen di masyarakat.

Diinisiasi oleh Perempuan

Di Negeri (Desa) Batu Merah telah dibentuk Satgas/Relawan COVID-19 yang melibatkan tujuh orang anggota dan pengurus Kelompok Konstituen Walang Hatukau dalam strukturnya. Kelompok Konstituen adalah organisasi tingkat komunitas yang dibentuk pada tingkat negeri/desa/kelurahan yang bertujuan mengorganisasikan komunitas untuk mengadvokasi hak-hak warga dalam mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara/pemerintah. Nama 'Kelompok Konstituen' dimaksudkan untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen (DPR/DPRD). Organisasi ini juga memperkuat warga dan membangun kesadaran kritis dalam berinteraksi dengan wakil mereka di parlemen maupun dengan pemerintah. Karena itu, Kelompok Konstituen adalah organisasi warga yang bersifat politis (MAMPU-BaKTI, 2019).

Sejak dibentuk tahun 2014, Kelompok Konstituen Walang Hatukau aktif mengadvokasi kepentingan warga dan mendorong perubahan-perubahan di Negeri Batu Merah. Karena itu, mereka dilibatkan dalam Relawan COVID-19 di Negeri Batu Merah. Begitu terlibat di dalam Relawan COVID-19, Kelompok Konstituen juga sudah siap dengan salah satu usulan yakni, Rumah Isolasi Mandiri bagi Perempuan Pelaku Perjalanan.

Pada beberapa kali pertemuan yang dilaksanakan oleh Desa dan Relawan COVID-19, Kelompok Konstituen Walang Hatukau mengusulkan pengadaan Rumah Isolasi Mandiri bagi Perempuan tersebut. Usulan ini disetujui

Di beberapa negara harus dilakukan penutupan wilayah (lockdown), untuk menghentikan virus yang menginfeksi berbagai ras manusia, bangsa, dan tanpa mengenal batas wilayah. Virus bergerak mengikuti perpindahan manusia, dan dengan cepat menyebar karena kerumunan atau kontak antar manusia.

Penyebaran COVID-19 juga telah menyebar di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Ambon. Karena itu, pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten sampai desa/negeri dan kelurahan, demikian juga di Provinsi Maluku dan



Foto: Dok. Yayasan Arika Mahina

Gagasan cemerlang Kelompok Konstituen Walang Hatukau dalam pembentukan Rumah Isolasi Mandiri mendapat apresiasi dan dukungan anggaran dari Dana Desa Negeri Batu Merah

oleh Pemerintah Negeri Batu Merah, sehingga pada tanggal 14 April 2020 Rumah Isolasi Mandiri bagi Perempuan Pelaku Perjalanan mulai difungsikan.

Kelompok Konstituen mengusulkan pembentukan Rumah Isolasi Mandiri bagi Perempuan pelaku perjalanan di Negeri Batu Merah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat Negeri Batu Merah sebagian besar berada di bawah garis kemiskinan dan tinggal di rumah yang tidak layak, maupun rumah kecil dan sempit, sehingga ketika ada perempuan pelaku perjalanan yang akan melakukan isolasi mandiri di rumahnya pasti akan berdampak bagi anggota keluarga yang lain.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Maluku yang telah mengadakan rumah isolasi dianggap tidak responsif terhadap perempuan dan anak, karena semua pelaku perjalanan yang melakukan isolasi, laki-laki maupun perempuan, tinggal bersama sehingga membuat ketidaknyamanan secara khusus bagi perempuan.

Dari Dana Desa

Gagasan yang disampaikan oleh Kelompok Konstituen Walang Hatukau kepada Pemerintah Negeri Batu Merah untuk membuat Rumah Isolasi Mandiri bagi Perempuan, dan menjadikan ruang Perpustakaan di lantai 2 Kantor Negeri Batu Merah sebagai ruang isolasi mendapat sambutan dari pemerintah negeri dan Relawan COVID-19. Apalagi Kelompok Konstituen juga telah menyiapkan Arita Muhlisa, yang merupakan anggota Kelompok Konstituen Walang Hatukau sebagai pengelola Rumah Isolasi Mandiri.

Gagasan cemerlang Kelompok Konstituen Walang Hatukau dalam pembentukan Rumah



Foto: Dok. Yayasan Arika Mahina

Isolasi Mandiri mendapat apresiasi dan dukungan anggaran dari Dana Desa Negeri Batu Merah, untuk penyediaan makan-minum, dan kebutuhan sehari-hari perempuan yang menjalani isolasi, serta pengadaan perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri) untuk Tim Relawan yang bekerja di Rumah Isolasi Mandiri.

Sementara Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Negeri Batu Merah juga memberikan dukungan berupa pemantauan serta pemberian obat dan vitamin bagi perempuan yang ada di Rumah Isolasi Mandiri.

Untuk mengakses Rumah Isolasi Mandiri telah dibuat beberapa prosedur tetap antara lain: perempuan pelaku perjalanan melaporkan diri ke RT/RW setempat dimana dia tinggal, selanjutnya tim kesehatan dari Puskesmas setempat datang untuk memeriksa perempuan pelaku perjalanan. Demikian juga, Tim Relawan COVID-19 akan melakukan kunjungan ke rumah perempuan pelaku perjalanan untuk mengecek situasi dan kondisi rumah. Jika kondisi rumah perempuan bersangkutan dianggap baik dan layak, maka dia akan tetap melakukan isolasi

mandiri di rumah. Tetapi jika rumahnya tidak layak untuk isolasi mandiri di rumah, maka dia akan dirujuk untuk diisolasi di Rumah Isolasi Mandiri yang telah disiapkan. Sampai dengan 24 April 2020, telah ada satu orang perempuan pelaku perjalanan yang diisolasi di Rumah Isolasi Mandiri Negeri Batu Merah.

Menurut Arita Muhlisa, awalnya upaya menjadikan lantai 2 Perpustakaan Hatukau yang dikelolanya itu, untuk menjadi Rumah Isolasi Mandiri bagi Perempuan Pelaku Perjalanan tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat. Ketika itu masyarakat yang berada di lingkungan sekitar Kantor Negeri Batu Merah mengetahui bahwa perpustakaan akan dijadikan rumah isolasi mereka protes dan menolak. Namun, melalui pemerintah negeri, saniri negeri, tokoh masyarakat, dan Relawan COVID-19, yang melakukan sosialisasi, pemahaman, dan pendekatan kepada masyarakat, akhirnya masyarakat bisa menerima dan mendukungnya.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program MAMPU-BaKTI, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**



Meki Nawipa:

"Saya Ingin Lihat Anak Asli Paniai Menggantikan Kami"

Oleh Syaifullah & Desi Mutialim

anggal 13 Desember 2018. Suasana hiruk pikuk di kegiatan pencairan dana program BANGGA Papua, menjadi makin riuh. Seorang lelaki bertubuh gempal berbatik warna ungu diiringi beberapa orang pria lainnya, tiba di lokasi pencairan dana. Semua tampak menghormatinya. Lelaki itu adalah Meki Fritz Nawipa, mantan pilot pesawat komersil yang resmi diangkat menjadi Bupati Paniai oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe tanggal 23 November 2018.



Meki Nawipa bersama para ibu yang anak mereka menjadi penerima manfaat dana bantuan BANGGA Papua (kiri). Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

mengaku sudah mulai merancang program tersebut. Dia menyebut program ini sebagai kolaborasi antara program BANGGA Papua yang merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Papua yang menjamin gizi anak usia empat tahun ke bawah, dengan program Kabupaten Paniai yang menjamin kesehatan para lansia.

"Ini (BANGGA Papua) sudah bagus, artinya dari nol hari sampai empat tahun sudah oke. Yang kita sedang buat adalah bagaimana Pemda Paniai masuk di usia yang belum dijangkau oleh BANGGA Papua, contohnya umur di atas 70 tahun. Jadi kita membiayai lansianya, BANGGA Papua membiayai anak-anak kecil yang o hari sampai 4 tahun, "jelas Bupati Nawipa.

Langkah pertama yang akan dilakukannya adalah melakukan pendataan bersama dengan Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai, untuk mengetahui berapa jumlah Orang Asli Papua berusia 70 tahun ke atas yang ada di Kabupaten Paniai.

"Ini yang kita mau lihat. Data riil ini. Jadi setelah itu, baru kita bicara berapa sih yang kita biayai," jelasnya lagi.

Ia merencanakan, nantinya masyarakat lansia di kabupatennya bukan hanya dapat uang, tetapi juga layanan kesehatan.

"Mereka (akan) diperiksa setiap 6 bulan. Sehingga orang-orang tua kami juga masih tetap hidup. Mati dan hidup di tangan Tuhan, tapi kita secara jasmani kita tolong," tegasnya.

Good Data, Good Plan

Dalam mewujudkan mimpinya ini, Meki Nawipa mengaku belajar banyak dari BANGGA Papua: akurasi data.

"Data. Ini menjadi sebuah pelajaran buat kami, sehingga ke depan, pemerintah juga bisa jeli melihat cara-cara kerja ini berdasarkan data. Itu salah satu hal yang menolong orang Paniai ke depan untuk bekerja jujur, karena sudah punya data yang bagus," akunya.

"BANGGA Papua ini tidak hanya bicara soal bagaimana membagikan dana Otsus kepada masyarakat, tapi juga bicara soal data yang riil. Kita tahu berapa jumlah anak usia empat tahun

Bupati Meki Nawipa dengan ramah menyapa orang-orang yang ada di lokasi, termasuk ibu penerima manfaat. Pada kesempatan itu, ia juga secara simbolis memberikan dana bantuan BANGGA Papua kepada salah satu penerima manfaat.

Dukungan Bupati Meki Nawipa kepada BANGGA Papua tidak pernah putus. Dalam wawancaranya dengan Syaifullah dari tim BaKTI-BANGGA Papua baru-baru ini, ia bahkan menjelaskan aspirasinya untuk memperluas program BANGGA Papua agar dapat memberikan lebih banyak manfaat pada masyarakat Paniai.

Terinspirasi BANGGA Papua

Pelaksanaan program BANGGA Papua juga menginspirasi Pemerintah Kabupaten Paniai untuk memperluas program perlindungan sosial tersebut. Meki Nawipa ingin menyasar warga lanjut usia. Ia



yang adalah Orang Asli Papua di Paniai," katanya. "Saya percaya, good data good plan, bad data bad plan, no data no plan," lanjutnya.

Proses pendataan calon penerima manfaat program BANGGA Papua memang melibatkan banyak pihak yang bertemu langsung dengan masyarakat sasaran. Ada aparat kampung, ada tenaga kesehatan seperti kader Posyandu, bidan atau petugas Puskesmas. Merekalah yang mendata langsung penerima manfaat, anak usia empat tahun ke bawah beserta ibunya. Proses pendataan juga menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar pencatatan dan verifikasi. Karena itu, data peserta BANGGA Papua dinilai akurat.

Menurutnya, sekarang pemerintahannya sudah tahu bahwa pada tahun 2018 sudah ada kurang lebih 6.000 anak di Paniai yang berhasil dibantu lewat program BANGGA Papua. Di tahun 2019, anak penerima manfaat BANGGA Papua bertambah menjadi 12.000.

Akurasi data ini ternyata juga menguntungkan banyak pihak. Bukan hanya Sekber BANGGA Papua, tetapi juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di Kabupaten Paniai.

"Data BANGGA Papua banyak digunakan oleh OPD lain di Paniai untuk merencanakan pembangunan," kata Elieser Yogi, Ketua Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai.

Menurut Elieser Yogi yang adalah juga Sekretaris Bappeda Kabupaten Paniai, ia sudah diperintahkan oleh Bupati Paniai untuk membagikan data BANGGA Papua kepada OPD lain yang membutuhkan. Salah satunya adalah dinas pekerjaan umum yang melakukan perencanaan berdasarkan data Orang Asli Papua yang dimiliki oleh Sekber BANGGA Papua. Program lain yang bakal membutuhkan data BANGGA Papua adalah perencanaan pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Paniai.

"Berarti bahwa umur anak-anak Paniai yang dari nol hari sampai empat tahun, itu kita sudah punya 12.000 data lengkap, alamat lengkap, dan itu membantu Pemda Kabupaten Paniai untuk kita mengambil kebijakan dalam membentuk program-program yang lain seperti pembangunan PAUD dan lain-lain. Kita mau melihat generasi emas Papua, Paniai ke depan," kata Meki Nawipa.

Meki Nawipa juga memberi jempol untuk kekompakan kerja tim Sekber BANGGA Papua Kabupaten Paniai yang berasal dari beragam OPD. Menurutnya, kerja lintas OPD itu mengilhami pola kerja yang sama di beberapa program di Paniai. Dia memberikan contoh rencananya membangun enam SD, enam SMP, enam SMA, dan enam Puskesmas di Paniai.

"Kita tidak kerja sendiri. Tidak bisa hanya dinas pendidikan atau dinas kesehatan saja yang masuk. Kita butuh Dinas Komunikasi dan Informatika masuk untuk pasang wifi, Dinas PU masuk supaya ada air bersih. Nah kalau program



Meki Nawipa secara simbolis memberikan dana bantuan BANGGA Papua kepada salah satu ibu penerima manfaat (kiri). Para penerima manfaat menanti dengan tertib saat proses pembayaran (kanan) Foto: Syaifullah/Yayasan BaKTI

ini bisa kita *match* antara program Kabupaten Paniai dan BANGGA Papua, maka hasilnya akan maksimal," kata Meki Nawipa.

"Visi misi saya kan ada satu kata: saling ketergantungan. Itu artinya bahwa bukan hanya satu kelompok atau satu organisasi atau satu dinas, tapi dari semua kelompok kita jadi satu," tambahnya lagi.

Prioritas: Pembangunan SDM

Ketika ditanya, bagaimanakah pemanfaatan dana Otsus yang lebih efektif? Digunakan untuk peningkatan kualitas SDM (sumber daya manusia), atau pembangunan infrastruktur?

Ternyata meningkatkan kualitas SDM menjadi tujuan utama dari masa pemerintahan Bupati Meki Nawipa. Menurutnya, ketika pertama kali dia resmi menjadi Bupati Paniai, dia merasa Kabupaten Paniai kekurangan dari berbagai hal. Namun, dia memutuskan untuk fokus di perbaikan sumber daya manusia dulu.

"Ya, kalau setelah saya jadi Bupati inikan saya melihat semua sisi kurang, jadi lebih bagus kalau kita membiayai SDM, orang-orang yang takut Tuhan, bisa dipercaya, ah karakternya bagus, dan itu harus kita mulai, jadi saya pikir SDM lebih penting, manusianya," kata Meki Nawipa.

Dalam sebuah pertemuan di kesempatan berbeda, Meki Nawipa juga mengakui kalau Program BANGGA Papua selaras dengan program kerja di masa kepemimpinannya. Dia ingin, pembenahan sumber daya manusia orang asli Paniai mendapatkan prioritas. Ia menilai, tujuan utama Program BANGGA Papua yang mendorong perbaikan gizi untuk anak-anak Paniai, sejalan dengan misi pemerintahannya.

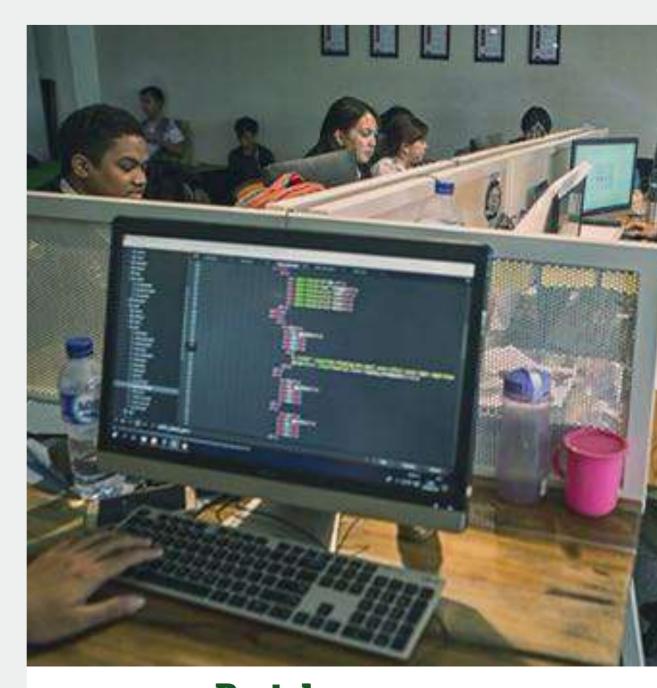
"Saya mau lihat bertahun-tahun nanti, anakanak asli Paniai yang akan menggantikan kamikami yang sekarang jadi pemimpin ini," katanya saat membuka kegiatan *Workshop* Refleksi BANGGA Papua Kabupaten Paniai yang diadakan di Enarotali, 25 Februari 2020. "Karena itu, saya sangat mendukung Program BANGGA Papua," sambungnya.

Karena itu pula, Meki Nawipa menyampaikan terima kasihnya kepada Gubernur Papua yang telah menggagas Program BANGGA Papua.

"Kita harus berterima kasih kepada bapak Gubernur Papua, karena program ini kita bisa menolong anak-anak Papua dari usia nol hari sampai empat tahun. Tetap BANGGA Papua maju terus. Kita bangga dengan BANGGA Papua."

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program BANGGA Papua dapat menghubungi **info@bakti.or.id**



Portal Analisis Data Berbasis Peta (PANADA) untuk **Perencanaan** Pembangunan di Kota Manado

Oleh **SUMARNI ARIANTO**

iawali dengan pembentukan SiGita (Sistem Gabungan Aplikasi Perangkat Daerah) suatu sistem antar perangkat daerah yang dipimpin oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) di Cerdas Command

Center, oleh Walikota kota Manado di tahun 2016



sistem ini kemudian diarahkan lebih ke pendataan. Hal ini menjadi salah satu alasan dilimpahkannya tugas ini ke Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kota Manado sebagai *leading sector* yang bertanggung jawab terhadap PANADA. PANADA, singkatan dari Portal Analisis Data Berbasis Peta yang terdiri dari kumpulan data-data dari berbagai sektor di Kota Manado dalam bentuk data geospasial dalam satu peta.

Kegiatan pengelolaan data di Cerdas Command Center, Kota Manado. Di sini pemutakhiran data lintas sektoral dilakukan lewat portal PANADA LINI Foto: Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

Sudah menjadi tugas utama Bappelitbangda untuk mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan perangkat daerah setiap tahunnya. Untuk bisa mengevaluasi kegiatan-kegiatan tersebut, diperlukan data untuk perencanaan di tahun berikutnya. Kemudian disusunlah *Big data* yang merupakan kumpulan data-data berbasis peta di Kota Manado yang akhirnya menjadi platform dasar sistem pemerintahan.

Untuk memudahkan koordinasi, dibentuklah satu UPT (Unit Pelayanan Teknis) yang khusus menangani pengelolaan data agar lebih fokus untuk melaksanakan pendataan, saat itu peta-peta data masih tersebar di beberapa dinas. Sebut saja data berbasis peta tentang sebaran infrastruktur di Kota Manado yang saat ini sudah bisa diakses di PANADA LINI. LINI atau singkatan dari Lintas Instansi ini adalah sistem pendataan pemutakhiran data pada system dimana tiap dinas dapat melakukan pemutakhiran secara langsung.

Dalam sistem pemerintahan berbasis eletronik seperti yang dikembangkan di Kota Manado, PANADA menjadi platform dasar. Kerjasama lintas sektor dalam PANADA dengan berbasis data terpadu bisa terlihat, misalnya data kelurahan di bidang kemiskinan; data dari dinas pendidikan yang salah satunya menyajikan data sebaran sekolah dimana informasinya bisa menunjang pemberlakuan sistem zonasi; data dinas perindustrian dan perdagangan terkait sebaran mini market, perdagangan jasa; data dinas pariwisata terkait destinasi pariwisata dan data dari sektor lainnya bisa terlihat melalui sistem ini. Data-data ini sangat membantu pemerintah dalam menetapkan perencanaan pembangunan dan tentunya juga membantu masyarakat umum untuk mengetahui geliat pembangunan.



Sebagai payung hukum yang menegaskan perlunya sinergi data sektor-sektor, terdapat Peraturan Walilkota yang mengatur mekanisme integrasi data sehingga ada beberapa dinas yang wajib berintegrasi, karena prinsipnya satu data untuk berbagi pakai.

Pemutakhiran Data

Untuk memastikan semua data yang disajikan dalam sistem ini ter*update*, mekanisme pemutakhiran data merupakan hal yang penting. Setiap tahunnya dilakukan pembaruan data. Misalnya khusus profil kelurahan, sejak tahun 2017 dilakukan pembaruan sekali setahun dengan melibatkan 504 kepala lingkungan. Para kepala lingkungan ini sudah mengerti bahwa pendataan adalah salah satu tugas mereka. Untuk data instansi teknis, setiap awal tahun melalui mekanisme evaluasi. Semua data ini kemudian diinput ke dalam sistem.

504 kepala lingkungan sebelum turun melakukan pendataan diberi pelatihan di Bapelitbangda dimana mereka dilatih oleh staf UPT yang terdiri dari tenaga-tenaga milenial. Tenaga milenial ini terdiri dari tim administrasi GIS, desain network dan lainnya. Untuk memudahkan penginputan data, sebanyak 87 smartphone diberikan kepada lurah. Lurah bertugas merangkum data yang telah dikumpulkan kepala lingkungan dalam bentuk form yang kemudian diinput melalui smartphone tersebut dan atau menggunakan laptop.

Dalam operasionalnya UPT Big Data didukung oleh tenaga milenial fresh graduated handal dari universitas negeri di Manado yakni Universitas Sam Ratulangi. Tim ini terdiri dari tim GIS yang bertugas mendigitasi semua bidang dan bangunan, ada tim admin database, tim keamanan sistem dan tim lainnya. Tim ini yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data yang bersumber dari peta rupa bumi, open street map dan peta citra satelit.

Sebagai salah satu bentuk respon pemerintah di masa pandemi COVID-19 adalah menyediakan data mengenai jumlah kasus COVID-19 di Kota Manado melalui laman Sipanse atau Sistem Pemantauan Sebaran COVID-19, dicatat terdapat pengunjung mencapai 11 ribu viewer sampai di luar negeri.



Dalam Sipanse ini memuat info terkait posisi ODP (Orang Dalam Pemantauan), PDP (Pasien Dalam Pemantauan), Pasien Dalam Perawatan.

Satu Portal Data Beragam Manfaat

Selain dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengambil keputusan, data yang disajikan dalam PANADA juga menjadi rujukan masyarakat umum. Data bisa membuat masyarakat jadi tertib misalnya data sempadan sungai yang sudah ditandai dengan garis merah, menjadi bahan rujukan masyarakat yang bermukim di sekitar sungai ketika akan membangun atau mengembangkan bangunannya, PANADA menjadi rujukan menerbitkan surat izin oleh DPM PTSP (Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu).

Terkait kesehatan reproduksi perempuan melalui Program PANADA untuk IVA (deteksi dini kanker serviks) bekerjasama dengan PKK di tingkat Puskesmas. Dalam program ini ibu-ibu didata terkait siapa-siapa yang telah melakukan pemeriksaan IVA.

Terkait retribusi IMB dan PBB PANADA menjadi alat kontrol, memudahkan operasional penagihan pajak dan retribusi di lapangan. Dalam operasionalnya UPT *Big Data* melibatkan tenaga milenial *fresh graduated* handal dari Universitas Sam Ratulangi (kiri) Data yang dapat diakses lewat PANADA menjadi rujukan menerbitkan surat izin oleh Dinas Penanaman Modal-Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kota Manado (kanan).

Foto: Adwit Pramono/Yayasan BaKTI

Masyarakat yang telah membayar PBB akan diberi tanda di rumah/pekarangan. Setiap akhir tahun, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berkoordinasi dengan kepala lingkungan untuk melakukan door to door mengingatkan warganya berbekal peta yang dapat diakses di *smart phone*.

Terkait pandemi COVID-19 saat ini, dalam sistem PANADA LINI juga menyajikan data titiktitik sebaran tempat cuci tangan. Dalam masa pandemi ini Walikota Manado mewajibkan 53 perangkat daerah menyiapkan tong cuci tangan. Tak ketinggalan, di tiap lingkungan yang berjumlah 504 juga diwajibkan menyiapkan tempat cuci tangan, data sebarannya di masingmasing lingkungan ini juga didata dan ditampilkan karena menjadi fasilitas layanan kota untuk pencegahan penyebaran COVID-19.

 BaKTINews
 No. 172
 Juni - Juli 2020
 12



Sumber: http://covid19.manadokota.go.id

Kepemimpinan juga sangat mendukung dan menjadi salah satu kunci kesuksesan program ini. Tim PANADA diberi kesempatan dan ruang untuk berinovasi agar segala sesuatu bisa dimudahkan dengan sistem ini.

Karena keberhasilannya dalam berinovasi, PANADA memperoleh berbagai penghargaan di tingkat nasional diantaranya masuk dalam Top 45 Kompetisi SINOVIK tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Selain itu setiap tahunnya juga mendapat penghargaan Simpul Jaringan dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Melihat keberhasilan ini, banyak kabupaten/kota yang datang berkunjung untuk belajar dan menimba ilmu. Bukan hanya dari dalam Provinsi Sulawesi Utara saja, kunjungan juga datang dari provinsi lain seperti dari Jawa Barat, DI Jogjakarta, Gorontalo dan beberapa provinsi di Sumatera.

Rencana pengembangan

Kerjasama dan sinergi lintas instansi di Kota Manado sendiri sudah dilakukan dalam PANADA dan saat ini terus berjalan. Untuk level nasional, sinergi juga sedang terus dilakukan seperti dengan Kemendagri. Setiap dua kali setahun Kemendagri melaksanakan survei capaian standar pelayanan perkotaan dengan berkunjung langsung ke Manado, namun sejak

ada PANADA mereka hanya perlu mengakses PANADA LINI saja. Dengan mengakses PANADA data terkait capaian sektor yang menjadi standar pelayanan kota bisa diperoleh, misalnya capaian di sektor kesehatan, sebaran sekolah, politeknik, universitas dan lainnya.

Saat ini juga sedang dikembangkan program Kelurahan Cerdas di mana setiap kelurahan yang mengelola dana kelurahan sejak tahun 2019, program dari pemerintah pusat, didata dan dipantau terkait *progress* visi keuangannya kemudian ditampilkan dalam PANADA.

Apa yang sedang dikerjakan Pemerintah Kota Manado dengan PANADA adalah sebuah langkah dalam menyiapkan salah satu tahapan pembangunan di mana data menjadi titik tolak dalam perencanaan. Dibutuhkan sumber daya manusia, infrastruktur, software dan hardware yang handal untuk bisa mewujudkannya. Tidak kalah pentingnya juga adalah komitmen pimpinan yang senantiasa memberikan dukungan dengan memberikan keleluasaan untuk selalu berinovasi. Di era reformasi birokrasi dan revolusi industri 4.0 ini pemerintah sebagai pelaku pembangunan utama harus dapat beradaptasi dan terbuka untuk belajar dan berinovasi, hal ini terjadi di Kota Manado melalui PANADA.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Praktik Cerdas ini, anda dapat menghubungi email: info@bakti.or.id

13 | BaKTINews No. 172 Juni - Juli 2020

KEBIJAKAN BERBASIS PENGETAHUAN:

Pengarusutamaan Kajian dalam Pengambilan Kebijakan di Sulawesi Selatan

Oleh RAHMAD SABANG

rogram *pilot* kebijakan berbasis pengetahuan di Sulawesi Selatan kerja sama BAPPENAS, BAPPELITBANGDA, KSI dan Yayasan BaKTI, atas dukungan dana Pemerintah Australia (DFAT) mulai bergulir akhir tahun 2019. Satu siklus diskusi multi pihak berhasil digelar, sebagai proses identifikasi dan menyepakati isu prioritas dan substansi kajian, untuk mendukung kebijakan tata kelola ekonomi daerah, berbasis komoditas. Forum diskusi multi pihak merekomendasikan pentingnya kajian rantai nilai dan tata kelola komoditas unggulan Sulawesi Selatan.

Beragam faktor mendukung pentingnya kajian rantai nilai dan tata kelola komoditas unggulan Sulawesi Selatan. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. Nurdin Abdullah, menempatkan riset, kajian atau penelitian sebagai *mainstream* setiap kebijakan sebelum dilaksanakan, hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Yusran Yusuf. M.Si. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Sulawesi Selatan, pada diskusi *online* 29 April 2020, yang dihadiri *Knowledge Sector Initiative* (KSI), Yayasan BaKTI, BAPPELITBANGDA dan tiga lembaga kajian, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), SMERU *Research Institute* dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Dr. Muhammad Taufik, M.Si., Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan-BAPPELITBANGDA Sulawesi Selatan, dalam suatu diskusi multi pihak menegaskan pentingnya kajian, penelitian sebagai basis penting perencanaan yang akurat dan pengambilan kebijakan yang tepat oleh pemerintah. Demikian halnya dengan upaya pengembangan suatu komoditas, perlu didukung dengan hasil kajian/riset yang komprehensif,



untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai daya dukung alam, lingkungan, lahan, potensi produksi sampai pada peluang pasar dan konsumennya.

Kajian rantai nilai dan tata kelola komoditas yang tepat, memungkinkan identifikasi secara akurat aspek-aspek yang berkontribusi atau turut memengaruhi tahapan proses pengelolaan komoditas dari hulu sampai hilir, termasuk aspek kebijakan, peran para pihak disetiap aspek, termasuk sub-sistem yang berpengaruh terhadap proses produksi. Dengan dasar inilah, pengembangan komoditas idealnya berbasis kajian yang hasilnya dituangkan dalam road map, grand design. Realitasnya, pengembangan komoditas di Sulawesi Selatan, seringkali atau bahkan pada umumnya dilakukan tanpa diawali kajian, atau belum memanfaatkan hasil-hasil kajian secara maksimal, dan belum berbasis pada road map atau grand design. Demikian pandangan Dr. Mahyuddin, M.Si., Dosen dan peneliti UNHAS, pada salah satu pertemuan kolaborasi.

Menurut Dr. Mahyuddin, banyak hal penting terkait dengan pengembangan komoditas, khususnya pertanian di Sulawesi Selatan, namun belum diketahui, apa sebenarnya yang harus

Telur, ulat, hingga kepompong sutra khas Soppeng Sumber foto: celebesmedia.id

dilakukan, pada level mana membutuhkan dukungan, dan seperti apa bentuk dukungan yang tepat. "ini terjadi karena belum adanya grand design, agenda dan strategi pengembangannya yang jelas". Diakui, bahwa pendekatan grand design dan roadmap tidak bisa diterapkan pada semua komoditi, fokusnya pada komoditi yang benar-benar akan dikembangkan.

Komoditas yang Layak Road Map

Sulawesi Selatan kaya dengan potensi komoditas yang beragam, dan jaminan prospek pasar lokal antar pulau hingga ekspor, yang idealnya pengembangannya berbasis grand design. Namun forum diskusi merekomendasikan kriteria komoditas yang layak dikaji, idealnya memenuhi kriteria yaitu; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberi nilai tambah, menyerap tenaga kerja, komoditas berdaya saing tinggi, tidak dapat ditiru, berpotensi dikembangkan secara luas atau memberi manfaat luas (skala kabupaten),

program prioritas pemerintah provinsi, kebanggaan (nilai tradisi), khas dan memiliki nilai budaya, jaminan pasar, melibatkan para pihak, keterlibatan perempuan dan inklusi sosial.

Aktifis perempuan Sulawesi Selatan, Lusi Palulungan, mengingatkan peran perempuan yang tidak spesifik dilihat dalam program pembangunan selama ini, apabila ini dikaji secara cermat *mainstream* gender seharusnya lebih jelas, dan lebih spesifik menurutnya dalam ranah inklusif, bisa dilihat bagaimana keterlibatan disabilitas atau kelompokkelompok marjinal, yang akan semakin memperkaya kajian dan korelasinya terhadap pendapatan perempuan.

Ada banyak pilihan komoditas Sulawesi Selatan, yang memenuhi kriteria di atas, namun pilihan yang direkomendasikan adalah Talas Satoimo. Komoditas baru, yang menarik pada evidence-based, belum banyak fakta, ketersediaan hasil kajiannya terbatas, belum banyak literatur yang basisnya praktik lokal. Komoditas ini, dirintis oleh gubernur dengan peluang pasar ekspornya yang besar, permintaan pasar Jepang sangat besar. Berbeda dengan pengembangan komoditas yang belum memiliki peluang akses pasar, dan seringkali gagal meraih peluang pasar, apalagi ekspor. Produksi digenjot tapi tidak memiliki skala ekonomi, karena pasar bermasalah, berdampak pada kekecewaan bagi petani. Hal ini penting menjadi pertimbangan dalam mendorong pengembangan komoditas.

Diusulkan pula sutra, komoditas lama yang tetap eksis, karena kekhasannya dan ditopang nilai sejarah yang sarat unsur budaya lokal dalam proses produksi dan pemanfaatannya. Oleh Gubernur Nurdin Abdullah dan Sudirman Sulaiman, mengambil kebijakan yang tepat dengan menjadikannya sebagai salah satu program prioritas dengan tagline "mengembalikan kejayaan sutra". Realitasnya, produksi benang sutra memang mulai redup, produksinya nyaris tak berdaya menghadapi persaingan harga benang impor produksi China, Thailand dan India, yang secara ekonomi jauh lebih rendah dari harga benang sutra lokal. Walaupun benang sutra produksi Sulawesi Selatan tidak diragukan lagi keasliannya, hanya saja kualitasnya mulai menurun, seiring berkurangnya kualitas bahan baku, dan terbatasnya dukungan alat-alat produksi.

Pilihan harga seringkali lebih diutamakan dibanding kualitas, situasi inilah yang semakin memperparah pasar sutra asli, kecuali oleh konsumen loyal dan memiliki keberpihakan terhadap produksi sutra lokal.

Upaya mengembalikan kejayaan sutra sangatlah tepat. Dr. Agussalim, Ekonom UNHAS menilai, revitalisasi industri sutra berpotensi menjadi industri alternatif untuk menunjang perekonomian Sulawesi Selatan. Pengetahuan rantai nilai yang komprehensif, melibatkan beragam pemangku kepentingan dari hulu sampai hilir, secara spesifik peran kelompok perempuan dominan dalam proses industrialisasinya. ''Mengembalikan kejayaan sutra'' tantangannya adalah mengembalikan animo masyarakat yang pernah gagal budidaya kokon.

Dr. Agussalim juga menilai kajian dua komoditas ini dibutuhkan, guna membantu pemerintah provinsi dalam merumuskan kerangka kebijakan yang tepat. Proses desain pelaksanaan kajian dihadang situasi pandemi COVID-19, yang telah menyebar luas hingga ke kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Situasi ini melahirkan tantangan baru, kajian lapangan berpotensi terhambat dengan kebijakan phisical distancing, hanya bisa dilakukan ketika situasi aman, pada saat yang sama para pihak "menuntut" adaptasi kajian terhadap isu-isu yang berkembang. Memastikan bagaimana kajian yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan berkontribusi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Dengan demikian dua kajian ini harus ditelaah secara cermat, untuk memastikan kontribusinya yang tepat, dan memperkuat kriteria komoditas yang layak kaji. Proses-proses telaah dan analisa dilakukan untuk memastikan melakukan kajian terhadap kedua komoditas ini, atau memilih salah satunya sebelum menjatuhkan pilihan yang tepat, Sutra atau Talas Satoimo?.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program Kebijakan Berbasis Pengetahuan di Sulawesi Selatan , anda dapat menghubungi email: info@bakti.or.id



Selamatkan **Anak Rentan** Melalui Layanan Puskesos Sebagai Service Hub PKSAI

Oleh ARAFAH

Strategi Keberlanjutan Service Hub PKSAI Gowa

Kelembagaan Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) di Kabupaten Gowa telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016, sebagai payung hukum/legalitas dalam menjalankan fungsi dan perannya secara baik. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, berimplikasi pada tersedianya dukungan anggaran daerah untuk kelancaran tugas-tugas operasional yang diperlukan oleh pengelola PKSAI.

Walaupun pemerintah telah mengalokasikan anggaran, namun dana yang dialokasikan masih terbatas jika dibandingkan dengan kebutuhan program dan kegiatan PKSAI, serta jangkauan wilayah layanan yang luas. Puskesos dibentuk untuk memudahkan masyarakat miskin dan rentan miskin di desa/kelurahan dalam menjangkau pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, desa dan kelurahan, serta swasta atau CSR.

Setidaknya Pemerintah Kabupaten Gowa menunjukkan komitmen dalam melaksanakan fungsi dan peran kelembagaan PKSAI untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara holistik, tepat, dan tuntas melalui keterpaduan layanan kesejahteraan anak dan layanan dasar lainnya.

Berdasarkan penilaian tahun 2018, pelaksanaan layanan PKSAI di wilayah uji coba Kabupaten Gowa menunjukkan hasil yang relatif signifikan. Saat ini Kabupaten Gowa menjalankan layanan terpadu, yang mencakup intervensi pencegahan, deteksi dini, dan rehabilitasi dengan lebih fokus pada deteksi dini. Hasil penilaian dengan menggunakan score card menunjukkan perubahan pada peningkatan jenis dan variasi layanan dari 16,7 persen menjadi 100; struktur organisasi yang ditetapkan dari 27,8 persen hingga 88,9 persen, sumber daya manusia yang tersedia dari 3,3 persen hingga 46,7 persen dan sistem data manajemen dari o persen hingga 33,3 persen.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor di Kabupaten Gowa mempermudah akses layanan bagi anak-anak dan keluarga rentan. PKSAI Gowa juga telah memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) untuk penjangkauan dan sebagian besar hasil penjangkauan telah ditindaklanjuti

Kelompok Sasaran Puskesos:

- Warga miskin dan rentan mskin yang terdapat atau tidak terdapat dalam Basis Data Terpadu yang dihasilkan melalui PBDT 2015 atau yang ada dalam basis data siskadasatu yang tinggal di desa/kelurahan setempat.
- 2 Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang ada di desa/kelurahan setempat
- Warga desa/kelurahan setempat lainnya yang memerlukan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Tugas dan Tanggung Jawab Puskesos

- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos melalui Alokasi Dana Desa atau Dana Desa
- 2 Mendukung dan memfasilitasi pemuktahiran data penerima manfaat di tingkat desa/kelurahan
- 3 Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi Puskesos yang terhubung dengan SLRT di tingkat kabupaten/kota
- 4 Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas desa/kelurahan
- Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau di kabupaten/kota melalui SLRT
- Membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan kapasitas agar terlepas dari ketidakmampuan untuk mandiri.
- 7 Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta (CSR) di desa/kelurahan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Menyusun laporan kegiatan Puskesos ke kabupaten untuk disampaikan kepada sekretariat nasional dan pihak terkait lainnya di daerah.



Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

oleh OPD terkait. Data per November tahun 2019 menunjukkan PKSAI Gowa telah memfasilitasi 906 layanan. Proses layanan dimulai dari pendataan, konferensi kasus, rencana kasus, rujukan, monitoring, dan terminasi. Rangkaian ini dilakukan melalui manajemen kasus yang dilakukan oleh Pekerja Sosial bersama tim pengelola PKSAI. Pembelajaran ini mulai diperluas ke tingkat desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gowa.

Apaitu Puskesos?

Puskesos merupakan lembaga yang dibentuk oleh desa/kelurahan yang memudahkan warga miskin dan rentan miskin di desa/kelurahan terkait untuk menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan swasta/CSR. Pemerintah desa/kelurahan diharapkan menyediakan kontribusi aturan dan anggaran untuk pelaksanaan Puskesos.

Puskesos dibentuk untuk memudahkan masyarakat miskin dan rentan miskin di desa/kelurahan dalam menjangkau pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, desa dan kelurahan, serta swasta atau CSR.

Puskesos berkedudukan sebagai lini terdepan yang bergerak di bidang pelayanan sosial secara langsung, meliputi aksesibilitas layanan sosial, pelayanan sosial untuk rujukan, pelayanan sosial untuk advokasi, serta penyedia data dan informasi.

Dalam memberikan pelayanan, Pusksesos bermitra dengan berbagai unsur, misalnya dengan karang taruna, Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pendamping Asistensi lanjut Usia Terlantar (ASLUT), organisasi masyarakat, tokoh



masyarakat, tokoh agama, Tim Penggerak PKK, remaja Masjid, Forum CSR, dan lain sebagainya.

Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) Memperluas Jangkauan Penanganan Anak Rentan di Tingkat Desa/Kelurahan

Untuk memperluas jangkauan PKSAI di Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, maka penting dilakukan pembentukan pusat layanan (service hub) di tingkat desa/kelurahan sebagai strategi mendekatkan layanan PKSAI bagi masyarakat. Pada tahun 2018, Pemerintah Kabupaten Gowa membentuk Pusksesos melalui Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2018. Puskesos yang dibentuk merupakan tempat pemberian layanan kesejahteraan sosial di tingkat desa/kelurahan. Layanan kesejahteraan sosial Puskesos mencakup pelayanan: pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial, ekonomi dan usaha, serta pelayanan dasar lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Gowa memilih 3 desa yakni Desa Panakukang, Desa Barembeng dan Desa Lembang Loe sebagai wilayah uji coba pengembangan layanan yang terintegrasi dengan PKSAI Gowa. UNICEF melalui Yayasan BaKTI memberikan dukungan teknis untuk memperkuat Puskesos sebagai *Service Hub* PKSAI di tingkat desa, terutama pada penguatan fungsi dan peran Puskesos dalam memberikan layanan bagi anak rentan yang ada di tingkat desa.

Diharapkan pula, dengan dibentuknya Puskesos di tingkat desa/kelurahan dapat berdampak positif terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan Hak Anak. Tanggung jawab ini bukan saja pemerintah tetapi semua pihak, serta membutuhkan peran dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat. Kehadiran Puskesos di tingkat desa diharapkan membuka akses warga desa terhadap layanan dasar yang dibutuhkan.

Melalui Puskesos, Kementerian Sosial terus mendorong pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa untuk melakukan inovasi terkait pelayanan publik, termasuk dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Layanan yang tepat sasaran, cepat, responsif dan terintegrasi.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program kerjasama Yayasan BaKTI - UNICEF dapat menghubungi email: info@bakti.or.id



Kurma Lastri untuk Kesehatan Lansia

Oleh dr. NURMAWARID



Program ini bertujuan agar lansia khususnya yang memiliki masalah kesehatan, memperoleh haknya untuk hidup sehat dan sejahtera tanpa diskriminasi. Mereka dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa dibatasi oleh kemiskinan dan faktor penghambat lainnya, sesuai komitmen pembangunan berkelanjutan no one leave behind

ditempuh, tidak ada biaya untuk berobat ataupun untuk transportasi, tidak ada yang menemani berobat, keterbatasan fisik maupun kurangnya pemahaman lansia dan keluarga tentang kondisi kesehatannya sehingga merasa tidak perlu berobat. Oleh sebab itu pada tahun 2017, Puskesmas Ko'mara bekerja sama dengan petugas kesehatan lansia berinisiatif untuk menjangkau sebanyak mungkin sasaran lansia resiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas melalui inovasi Kurma Lastri (Kunjungan Rumah untuk Lansia Resiko Tinggi) dengan kegiatan Kurma Palem (Kunjungan Rumah Pelayanan Kesehatan Menyeluruh), Kurma Lulu (Kunjungan Rumah Lansia Bugar Lawan Lupa), dan Kurma Muda (Kunjungan Rumah Mampu Bardaya). Lintas sektor dan masyarakat turut dilibatkan dalam pelaksanaannya. Inovasi ini didukung oleh SK Kepala Puskesmas Ko'mara Nomor: 497/PKM-KM/SK/TU/VI/2017

faktor jarak dan sulitnya medan yang harus

Program ini bertujuan agar lansia khususnya yang memiliki masalah kesehatan, memperoleh haknya untuk hidup sehat dan sejahtera tanpa diskriminasi. Mereka dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas tanpa dibatasi oleh kemiskinan dan faktor penghambat lainnya, sesuai komitmen pembangunan berkelanjutan

akupan pelayanan kesehatan lanjut usia di Kabupaten Takalar tahun 2016 masih rendah yakni 39,8 persen. Di wilayah kerja Puskesmas Ko'mara pun dari target sasaran sebesar 70 persen atau 596 lansia cakupannya hanya 9 persen yaitu 53 orang.

Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan lansia di wilayah kerja Puskesmas Ko'mara disebabkan oleh sulitnya akses lansia menuju pelayanan kesehatan, yang dipengaruhi oleh



no one leave behind. Tak kalah pentingnya adalah mengenali lansia sebagai agen aktif dalam pembangunan, mendukung dan menstimulasi mereka untuk berdaya guna bagi diri, keluarga dan masyarakat.

Inovasi ini merupakan salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kelompok lansia khususnya lansia resiko tinggi dengan penyakit yang umumnya multi diagnosis, degeneratif dan kronis, seperti hipertensi dan diabetes, namun sulit mengakses pelayanan kesehatan.

Jika sebelumnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mereka harus ke pusat pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas Pembantu maupun Puskesmas, dengan Kurma Lastri, lansia resiko tinggi memperoleh layanan kesehatan terpadu dan berkualitas di rumah mereka. Mereka tidak lagi

perlu memikirkan biaya untuk berobat atau transportasi, tidak lagi menahan sakit dan menyimpan keluhannya sembari menunggu kapan dan siapa anggota keluarganya yang bersedia meluangkan waktu menemani mereka berobat.

Sebab setelah mendapatkan laporan dari keluarga/masyarakat, lintas program, lintas sektor, tim Kurma Lastri yang terdiri dari dokter dan lintas program Puskesmas mengunjungi rumah pasien lansia dan memberikan pelayanan secara terpadu berdasarkan resiko kesehatannya dan menstimulasi mereka untuk tetap berdaya guna di masa tuanya melalui edukasi perilaku hidup sehat, mengembangkan hobi sesuai kemampuan, dan meningkatkan hubungan sosial di dalam masyarakat.

Cakupan pelayanan kesehatan lansia di wilayah kerja Puskesmas Ko'mara meningkat

Inovasi ini merupakan salah satu strategi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan kelompok lansia khususnya lansia resiko tinggi dengan penyakit yang umumnya multi diagnosis, degeneratif dan kronis, seperti hipertensi dan diabetes, namun sulit mengakses pelayanan kesehatan.

menjadi 12 persen pada tahun 2017 dan menjadi 42 persen pada tahun 2018. Di Dusun Panaikang Lompo, sebagai lokasi awal pelaksanaan Kurma Lastri, pada tahun 2016 cakupan pelayanan kesehatan lansia hanya 33 persen meningkat menjadi 66,67 persen pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 100 persen pada tahun 2018. Lansia resiko tinggi di Dusun Panaikang Lompo dengan hipertensi yang terkontrol sebesar 77 persen, dan diabetes yang terkontrol 50 persen.

Kurma Lastri yang awalnya dilaksanakan di Dusun Panaikang Lompo, telah direplikasi ketujuh dusun lainya dalam wilayah kerja Puskesmas Ko'mara yakni Balangasana, Borongkaramasa, Pangkaje'ne, Sauleya, Bulubumbung I, dan Pa'lilanga. Kurma Lastri juga telah diadaptasi oleh Puskesmas Towata, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar melalui transfer knowledge dalam bentuk best practice implementasi kurma Lastri dalam menjangkau sasaran lansia resiko tinggi di wilayah kerja Puskesmas.

Dengan Kurma Lastri terbukti dapat meningkatkan hubungan sosial yang harmonis antara lansia dengan keluarga, kelompok sebaya, dan masyarakat melalui berbagai kegiatan Kurma Lastri yang dikemas dalam suasana santun, kekeluargaan dan menyenangkan. Misalnya saat konseling, senam kebugaran, senam otak maupun edukasi. Kegiatan ini pun meningkatkan

kepedulian keluarga dan masyarakat terhadap lansia. Dari aspek ekonomi, layanan kesehatan terpadu dan berkualitas yang mudah diakses oleh lansia resiko tinggi. Dengan tubuh dan jiwa yang sehat lansia dapat hidup secara aktif, mandiri dan produktif. Secara spesifik, Kurma Muda (Kunjungan Rumah : Mampu Berdaya) memberikan dukungan melakukan kegiatan yang sifatnya income generating. Sedangkan keberlanjutan Kurma Lastri dari aspek lingkungan yakni edukasi kesehatan pada lansia, keluarga dan masyarakat mengenai pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berkontribusi positif bagi lingkungan. Misalnya tidak BAB di jamban liar, sungai, semak-semak namun di WC yang dilengkapi tangki septik agar tidak mencemari lingkungan. Saat ini pun kelompok lansia bersama kader dan ibu-ibu PKK di Dusun Panaikang Lompo dan Bulubumbung I tengah berupaya mengelola sampah plastik menjadi barang baru yang dapat digunakan kembali serta bernilai ekonomis seperti dompet, tempat tisu dan tempat sampah.

Kurma Lastri memiliki potensi untuk direplikasi sebab prosesnya mudah dan biayanya murah namun memberikan hasil yang signifikan. Kegiatan yang awalnya hanya dilaksanakan di Dusun Panaikang Lompo telah direplikasi keenam dusun lainnya dalam wilayah kerja Puskesmas Ko'mara dan telah diadaptasi oleh Puskesmas Towata Kabupaten Takalar.

Melalui Kurma Lastri, para lansia menikmati masa tuanya dengan pelayanan kesehatan dan langsung diantarkan kerumah. Para lansia bukan lagi sebagai beban keluarga namun menjadi lansia SMART (sehat, aktif, mandiri dan produktif) yang berpartisipsi aktif dalam masyarakat.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Dokter di Puskesmas Ko'mara Kec. Polongbangkeng Utara, Dinas Kesehatan Kab. Takalar. Penulis dapat dihubungi melalui email: nurmawaridmunawar@gmail.com



Tekad Membangun Perencanaan Tersinergi di Kampung Marsi

Oleh HALIA ASRIYANI

erjarak sekitar 10 KM dari Ibu kota Kabupaten Kaimana, di bagian timur terdapat sebuah kampung bernama Kampung Marsi. Jalan menanjak dan berliku membelah perbukitan mewarnai perjalanan menuju kampung ini. Sebagian jalanan menuju kampung adalah jalan tidak beraspal dengan batu kerikil yang membuat perjalanan menjadi lambat. Namun sambutan pemandangan indah dari Kolam Sisir yang hijau dalam perjalanan membuatnya jadi tidak menjenuhkan.

Kampung Marsi adalah kampung yang dihuni oleh Suku Mairasi, salah satu suku tertua di Kaimana. Mairasi berarti orang berkulit hitam dan berambut keriting. Namun kini telah banyak pendatang yang bekerja dan menetap di Kampung Marsi. Kondisi ini sedikitnya menggambarkan keterbukaan orang-orang Mairasi kepada pendatang.

Pagi itu, 3 Februari 2020, satu per satu orang berdatangan di Balai Kampung Marsi. Mereka adalah aparat kampung dan para tokoh masyarakat yang hendak mengikuti proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK). Setelah selesai dengan pemilihan kepala kampung pada akhir tahun 2019, kini saatnya mereka menyusun





Foto-foto: Dok. Yayasan BaKTI

RPJMK. Kali ini, proses penyusunan RPJM Kampung Marsi akan dilakukan dengan melibatkan perwakilan dari bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka adalah para staf Pustu Kampung Marsi serta para pengajar SD YPK SISIR I yang turut hadir pula pagi itu.

Pendampingan Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Kampung, Puskesmas dan Sekolah di Kampung Marsi berlangsung selama lima hari (3-7 Februari 2020). Para peserta belajar sekaligus mempraktikkan langsung proses perencanaan kampungnya. Kegiatan ini dipandu oleh tim fasilitator dari Provinsi Papua Barat dan dari Kabupaten Kaimana yang sebelumnya telah dipersiapkan melalui kegiatan training of trainer sinergi perencanaan oleh tim KOMPAK-LANDASAN Fase II pada November 2019 lalu. Mereka adalah Umi Riantiny dari DPMK Provinsi Papua Barat yang akan memfasilitasi kelompok kampung bersama dengan Barnesi Ketsia Dias dari DPMK Kabupaten Kaimana dan Moh. Dain Warfete dari Bappeda Kabupaten Kaimana. Kelompok Kesehatan sendiri difasilitasi oleh Richard Tombiling dari Dinas Kesehatan

Kabupaten Kaimana. Sementara kelompok pendidikan difasilitasi oleh Blasius Kilmas dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaimana.

Melalui sinergitas perencanaan ini akan lahir usulan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK); Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pustu Kampung Marsi; serta Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) SD YPK Sisir I. Semua dokumen ini nantinya akan menjadi acuan dalam melakukan kegiatan pembangunan di Kampung Marsi. Juga menjadi program yang akan dilaksanakan Pustu dan sekolah dalam memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat Kampung Marsi.

"Kita bertekad untuk membuat RPJM Kampung sendiri sesuai dengan masukan dan kebutuhan masyarakat," tegas Kepala Kampung Marsi, Roni Jaisona dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan.

Roni sendiri sebelumnya adalah kader kampung yang mengelola SAIK (Sistem Administrasi dan Informasi Kampung) di Kampung Marsi. Data SAIK yang tersedia inilah kemudian menjadi acuan dalam membuat perencanaan kampung yang berbasis data.

Musyawarah Kampung, Menyepakati Masalah Kampung Bersama-sama

Dalam musyawarah kampung, pihak sekolah dan Pustu hadir untuk menyampaikan hasil identifikasi mereka tentang permasalahan kesehatan dan pendidikan di Kampung Marsi berdasarkan data yang mereka miliki. Proses partisipatif pun terjadi dalam tahap ini. Semua peserta berkesempatan untuk menyampaikan saran dan harapannya terkait layanan dasar di kampung. Dalam pemaparan perwakilan Pustu Kampung Marsi, terdapat empat kondisi kesehatan di Kampung Marsi yang menjadi prioritas. Masalah tersebut antara lain adanya tujuh kasus balita dengan gizi kurang; 80 persen ibu hamil tidak melahirkan di fasilitas layanan kesehatan; terdapat 80 persen bayi usia 0-11 bulan yang tidak memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan 77,46 persen keluarga tidak

menggunakan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan pemaparan dari Pustu Kampung Marsi, banyak dari peserta yang mulai menyadari bahwa masalah-masalah tersebut memang perlu mendapat perhatian. Richard Tombiling, fasilitator kelompok kesehatan menyampaikan bahwa kasus gizi kurang ini perlu ditangani dengan benar. "Ini fakta yang kita temukan. Ada tujuh balita mengalami gizi kurang. Kalau ini sampai ke level gizi buruk, itu tidak akan bisa disembuhkan," tegasnya.

Sementara itu, Kampung Marsi hingga kini belum memiliki Posyandu. Hal tersebut menyebabkan perkembangan balita tidak terpantau dengan baik oleh petugas kesehatan. Peserta lalu menyimpulkan bahwa ketiadaan Posyandu ini menjadi salah

satu faktor penyebab terjadinya kasus gizi kurang di kampung mereka dan menjadi penyebab bayi usia 0-11 bulan tidak memperoleh Imunisasi Dasar Lengkap.

Mengenai persoalan ke dua di mana 80 persen ibu hamil tidak melahirkan di Pustu menyebabkan risiko kematian ibu dan bayi saat persalinan menjadi tinggi. "Ibu-ibu mungkin merasa lebih nyaman di rumah saja. Dipikirnya kami juga bisa datang membantu proses persalinan. Tapi tidak bisa kami bawa semua alat-alat kesehatan yang dibutuhkan kalau darurat. Belum lagi kondisi tempatnya tidak steril. Ini penting dan harus kita perhatikan bersama," ungkap Hasrawati, Bidan Pustu Kampung Marsi. Pada kesempatan tersebut, muncul saran dari peserta untuk membuat peraturan kampung (Perkam) yang mengharuskan ibu hamil melahirkan di fasilitas kesehatan, termasuk kewajiban memeriksakan kehamilan minimal empat kali selama masa kehamilan.

Mengenai air bersih, seluruh peserta menyepakati bahwa memang ini adalah masalah penting. Berdasarkan analisa masalah menggunakan alat sketsa kampung, peserta menemukan bahwa kasus diare memang banyak terjadi di daerah yang tidak memperoleh aliran



air bersih. Pihak kampung pun menyetujui untuk membuat jaringan pipa yang mengantarkan air bersih ke rumah-rumah warga yang belum teraliri sebagai solusi masalah ini.

Dari bidang pendidikan sendiri, pihak sekolah berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan. Salah satunya adalah tidak tercukupinya buku pelajaran untuk menunjang proses belajar siswa. Alokasi dana BOS sendiri tidak cukup untuk mengadakan buku-buku pelajaran tersebut. "Anak-anak kami itu ada 66 orang. Masing-masing di kelas ada 9-15 orang. Tapi paling banyak cuma ada 3 buku pelajaran. Solusi kami adalah meminta mereka fotokopi, tapi hanya sedikit juga yang mampu fotokopi." Jelas Sri Wahyuni, Guru SD YPK Sisir I.

"Masalah kurangnya jam belajar juga menjadi perhatian penting dalam forum ini. Siswa masuk sekolah seringkali di antara pukul 09.00 hingga 10.00, kemudian sudah pulang pukul 12.00. Untuk itu Fitri L.Tawang, Gusu SD YPK Sisir I menghimbau kepada orangtua agar bisa mengingatkan anak-anaknya ke sekolah tepat waktu serta ikut memperhatikan jam belajar anak-anak mereka di rumah. Kurangnya kemampuan akademik siswa



terbukti dari hasil ujian sekolah yang sebagian besar memperoleh nilai di bawah standar juga disampaikan oleh tim sekolah. Mereka bermaksud mengadakan jam pelajaran tambahan dengan bantuan pembiayaan guru honor dari kampung.

Mengetahui kondisi kesehatan dan pendidikan di kampungnya, Kepala Kampung Marsi, Roni Jaisona menyampaikan bahwa musyawarah ini telah membuka mata kita. Baginya, masalah kesehatan dan pendidikan adalah juga masalah kampung. Ia berjanji untuk memperhatikan temuan yang telah disampaikan dalam menyusun program kerjanya.

Beberapa usulan yang berhasil disepakati di bidang kesehatan diantaranya pembuatan peraturan kampung untuk mewajibkan ibu-ibu melahirkan di fasilitas layanan kesehatan yang tersedia dan memeriksakan diri selama masa kehamilan, pembangunan posyandu beserta insentif kader untuk memantau perkembangan anak, dukungan penyelenggaraan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi kurang, membantu pengadaan beberapa alat-alat pemeriksaan kesehatan; serta sosialisasi kesehatan.

Untuk sektor pendidikan, kampung bersedia untuk membantu pengadaan buku pelajaran siswa dan membiayai guru honor untuk mengajar di kelas tambahan bagi siswa. Kampung juga menyisihkan dana tambahan untuk menambah buku bacaan dan membangun perpustakaan bagi sekolah. Termasuk membantu perbaikan atap sekolah yang rusak.

Selesai dengan RPJMK, selanjutnya peserta bersama-sama menentukan kegiatan yang akan dianggarkan pada tahun 2020 dalam RKPK. Proses musyawarah pun diakhiri dengan kesepakatan bersama anatara kampung, Pustu dan sekolah.

Sampai di sini penyusunan dokumen RPJMK belum berakhir. Masih ada proses panjang yang akan mereka lalui. Terutama Tim 11 sebagai penyusun dokumen RPJMK. Namun

mereka berkomitmen untuk menyelesaikan dokumen RPJMK pada akhir Maret 2020. Selama itu, proses pendampingan akan terus berjalan oleh fasilitator lokal dan tim KOMPAK-LANDASAN Fase II. Begitu pula Pustu dan sekolah yang masih harus menyempurnakan dokumen perencanaan mereka.

Desiderius Bir, Spesialis Kesehatan tim KOMPAK-LANDASAN Fase II menyampaikan bahwa dari 17 kampung yang ada di Distrik Kaimana, Kampung Marsi merupakan kampung pertama yang melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya. Riuh tepuk tangan peserta pun menyambut pernyataan tersebut. Ia juga tak lupa mengingatkan tugas yang masih harus dijalankan hingga dokumen RPJMK bisa benar-benar selesai dan menjadi dokumen yang resmi. "Harapannya adalah Kampung Marsi ini ke depan menjadi contoh bagi kampung lain. Meski baru dalam tahap awal, namun kita telah memulainya bersama."

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Program KOMPAK-LANDASAN Fase II, dapat menghubungi **info@bakti.or.id**

Norma Gender Berpengaruh **Terhadap** Kesehatan Reproduksi?

Oleh MEGA S HARUNA

orma gender yang tidak setara tidak menguntungkan posisi perempuan dalam bernegosiasi seputar pemanfaatan reproduksi vang mereka miliki.

Yani (nama samaran) mengeluh sekaligus mensyukuri kehamilan keduanya. Dua hal bertentangan yang ternyata bisa berjalan beriringan. Menurutnya, 'anak' akan menjadi 'penghalang' untuk berkarir atau mencari nafkah.

Dia melanjutkan, bahwa baik pekerja kantoran, petani, atau pedagang sama saja, seringkali pekerjaan mereka tidak optimal karena atasan atau kolega bisnis sering mempertimbangkan fungsi perempuan sebagai 'ibu'.

Kalau bukan karena keinginan dari suaminya, sebetulnya dia belum siap punya anak lagi. Kehidupan finansial yang belum mapan dan jenjang karirnya adalah pertimbangan utamanya. Pimpinan di kantor membatasi pekerjaannya karena kehamilan dianggap sebagai kelemahan padahal rekapan gaji dihitung dari seberapa banyak pekerjaan/proyek yang diberikan. Tetapi Yani harus menghargai kehendak suami yang sangat menginginkan kehadiran seorang anak lagi, tambahnya.

Norma gender yang tidak setara tidak menguntungkan posisi perempuan dalam



bernegosiasi seputar pemanfaatan organ reproduksi yang mereka miliki. Norma yang menentukan sikap, peran, dan relasi antar anggota dari struktur masyarakat ini bersifat relatif, bukan hukum baku. Tetapi karena sifatnya hierarki sehingga ada kedudukan yang terpinggirkan dari sistem itu, dan perempuan yang merupakan pusat reproduksi justru terkesan dipisahkan dari tubuhnya. Sistem reproduksi yang mereka miliki diatur oleh orang lain. Relasi kuasa akan berpengaruh pada pengambilan keputusan. Perempuan (istri) dalam budaya patriarki seringkali ditempatkan



di kedudukan yang lebih rendah dari suami. (Aristiana Prihatining Rahayu dan Waode Hamsia, 2018; International Centre for Research on Women and Girls Not Brides, 2015)

Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera secara kompleks, di mana tolok ukur yang digunakan bukan hanya dari segi fungsi biologis semata melainkan aspek sosial dan mental yang kadang kala justru dipinggirkan ketika menilai status kesehatan. Sementara norma gender mengatur bagaimana seseorang bertindak, memahami, bahkan berperasaan tumbuh dari unit sosial terkecil yaitu keluarga

sampai unit besar di lingkungannya yaitu teman, masyarakat, tempat kerja, bahkan media dan kebijakan pemerintah.

World Health Organization telah mencanangkan tiga faktor penentu status kesehatan reproduksi, diantaranya: (1) perbedaan biologis yaitu anatomis, fisiologi, genetik, dan sistem imunitas (2) perbedaan sosial budaya seperti peran dan tanggung jawab, serta norma yang berlaku di masyarakat (3) akses dan kontrol terhadap sumber daya kesehatan: ekonomi, sosial, politik; ketersediaan dan kualitas informasi dan edukasi tentang

kesehatan reproduksi; ketersediaan waktu untuk berpartisipasi dalam program kesehatan reproduksi; ketersediaan dan kualitas layanan; keterbatasan sumber daya internal; otoritas terhadap tubuh sendiri untuk memilih layanan yang diinginkan; kontrol antara pengambilan keputusan dan keterampilan mencegah komplikasi penyakit.

Sustainable Development Goals atau SDGs yang merupakan kelanjutan Millennium Development Goals (MDGs) berlaku dari tahun 2016-2030 menegaskan bahwa salah satu poin penting pada 'Tujuan 3' (Goals III) yaitu menargetkan akses layanan untuk perawatan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk di dalamnya adalah keluarga berencana, informasi dan pendidikan, serta adanya integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.

Lebih lanjut di 'Tujuan 5' (Goals V), menempatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai poin utama. Selain terbebas dari diskriminasi dan kekerasan, perempuan berhak mendapatkan edukasi dan akses terhadap kesehatan reproduksi dan seksual.

Kaitan antar norma gender dan status kesehatan reproduksi perempuan sangat nampak ketika menganalisis faktor-faktor penyebab masalah kesehatan reproduksi yang terjadi. Namun sayang, meskipun menimbulkan morbiditas sampai mortalitas pada perempuan, belum ada perhatian penuh yang berspektif gender untuk menanganinya. Karena norma masyarakat yang dinaturalisasi sehingga dianggap bukan persoalan krusial.

Secara tidak langsung, Yani masuk dalam kategori unmet need, yaitu kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi. Meskipun dia secara sadar melakukan program kehamilan kedua, tetapi sebagai perempuan yang memiliki kehendak atas pusat reproduksinya memerlukan kontrasepsi. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa unmet need disebakan oleh tidak adanya dukungan suami untuk mengakses kontrasepsi, meskipun fasilitas kesehatan sudah memadai.

Biasanya, perspektif suami dipengaruhi oleh kepercayaan budaya yang dianut. Suami yang berperan sebagai pemimpin dalam rumah tangga mendapat posisi istimewa ketika bernegosiasi. Karena kepemimpinan yang jalankan adalah sebagai 'pengatur' bukan 'pelindung' bagi keluarganya. Jika suami berperan sebagai 'pelindung' maka mereka akan memikirkan risiko-risiko kesehatan yang akan menimpa anggota keluarganya sebelum mengambil keputusan.

Edukasi mengenai alat kontrasepsi lebih banyak menyasar perempuan ketimbang lakilaki. Alat-alat kontrasepsi dari bahan kimia banyak mengakibatkan efek negatif untuk tubuh perempuan jika yang berpengaruh terhadap sistem tubuhnya: sakit kepala, muntah, haid tidak teratur, bintik-bintik hitam pada kulit atau, kesakitan di bagian lengan yang disisipi implan. Padahal efek negatif dari alat kontrasepsi pada laki-laki justru sangat minim.

Berbagai keyakinan akan tafsir agama juga memengaruhi norma gender dan keputusan. Kita pernah mendengar perihal mati syahidnya seorang perempuan jika meninggal dalam persalinan. Kematian ibu yang tidak memperlihatkan penurunan signifikan sebetulnya bisa diminimalisir melalui pemeriksaan kehamilan rutin untuk menganalisis faktor-faktor risiko berbahaya jika melahirkan atau mendeteksi penyakit/ kemungkinan sakit sebelum kehamilan sehingga hal-hal negatif bisa diminimalisir.

Kesakitan seperti itu ditempatkan sebagai takdir yang tidak bisa diubah, padahal ada usaha preventif yang bisa dilakukan, bukan hanya pasrah dan ikhlas kemudian berharap diberikan pahala sebagai *impact* dari kesakitan yang telah dijalaninya.

Praktik merugikan lainnya yang berkaitan erat dengan norma gender adalah perkawinan anak dan Female Genital Mutilation. Namun norma gender biasanya tidak berdiri sendiri dalam memengaruhi status kesehatan reproduksi, melainkan memiliki faktor pendukung seperti kebijakan politik, ekonomi, pendidikan, akses fasilitas, dan lain-lain.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari https://geotimes.co.id/opini/normagender-berpengaruh-terhadap-kesehatan-reproduksi/



Inovasi Pelayanan Publik, Bukti Hadir Pemerintah

Oleh FADIAH MACHMUD

Gandeng Swasta Atasi Keluhan Ibu Hamil dengan Praktik Pendekatan ANC Hipnoterapi

da yang menarik dilakukan oleh PT Vale Indonesia Tbk dalam kontribusinya mengatasi berbagai keluhan ibu hamil di Puskesmas-Puskesmas di Luwu Timur. Bersama pemerintah setempat, PT Vale

Indonesia Tbk mendorong metode yang amat modern dan kekinian, yaitu tata laksana hipnoterapi.

Praktik Hipnoterapi ini disebut ANC Hipnoterapi dan dinilai berhasil oleh banyak pihak dalam



Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur melakukan Studi Visit Pelaksanaan ANC Hipnoterapi di Kabupaten Luwu Utara Foto: tekape.com

mengatasi berbagai macam keluhan ibu hamil. Sebuah inovasi yang pertama kali dilakukan di Puskesmas Sukamaju Kabupaten Luwu Utara. Karena keberhasilannya, saat ini inovasi tersebut juga disebarluaskan ke 10 Puskesmas yang lain di Kabupaten Luwu Timur.

Inovasi ANC Hipnoterapi di Puskesmas Sukamaju telah berhasil masuk TOP 99 dan TOP 40 pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun 2018 serta nominasi kompetisi tingkat dunia (United Nation Public Service Award-UNPSA) Tahun 2019. Inovasi ini berhasil menghilangkan keluhan sakit pada ibu hamil, mempersiapkan mental ibu hamil agar siap menghadapi persalinan. Inovasi dengan metode relaksasi dan EFT (Emotional Freedom Tekniques) melalui teknik Endorphin Tapping dan Endorphin Touching terbukti menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) sampai di bawah target SDGs di bawah 70 per 100.000 KH atau 0,0007, menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai target SDGs hingga 12 per 1.000 KH atau 0.012.

Selain itu terjadinya penurunan Angka BBLR penyebab anak kerdil (stunting) dari 275 kasus pada Tahun 2017 menurun hingga tersisa 50 kasus pada Tahun 2018. Sisi baiknya inovasi ini adalah kehadiran jumlah ibu hamil dalam kelas ibu meningkat drastis, sebelum inovasi hanya berkisar 50 persen, meningkat menjadi 90

persen bahkan sampai 100 persen, akibat dari peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang ramah dan dengan hati tanpa menggunakan obat dan tanpa efek samping.

Adaptasi inovasi ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama TRANSFORMASI-GIZ Program Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Republik Federal Jerman, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur dengan menggandeng PT Vale Indonesia Tbk, sebuah perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia yang berada di wilayah Sorowako, Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan.

PT Vale mempunyai Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah terdampak operasi yakni kepada empat kecamatan: Nuha, Towuti, Wasuponda dan Malili. Untuk penerapannya, berbagai diskusi dilakukan bersama dengan Program TRANSFORMASI dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh pemangku kepentingan relevan, baik dari pihak PT Vale Indonesia, lembaga konsultan Vale, serta Dinas Kesehatan Luwu Timur. Pertemuan dimaksudkan untuk menyepakati strategi yang efektif dalam mengadaptasi inovasi ANCHipnoterapi.

Langkah-langkah implementasi yang disepakati adalah pertama, pengenalan konsep dasar dan pernyataan minat, yakni workshop mengenalkan konsep inovasi ANC Hipnoterapi

kepada petugas layanan Puskesmas (Pimpinan, dokter, bidan), mengenali potensi yang tersedia di masing-masing Puskesmas untuk melakukan adaptasi dan menandatangani komitmen kesediaan. Kedua, kunjungan belajar, yakni mengunjungi Puskesmas Sukamaju untuk melihat langsung praktik ANC hipnoterapi. Ketiga, capacity building, yakni petugas layanan Puskesmas mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tentang pelaksanaan ANC Hipnoterapi, teknik dan pelaksanaanya. Keempat, menyusun rencana aksi adaptasi inovasi untuk diterapkan di masing-masing Puskesmas. Kelima, implementasi inovasi hasil adaptasi ANC Hipnoterapi.

Langkah pertama dan kedua telah dilaksanakan. Banyak pembelajaran menarik yang diperoleh. Seperti yang disampaikan oleh Bidan Mike, bidan yang bertugas di Puskesmas Nuha. Setelah mengikuti workshop dan studi belajar, beliau menyampaikan pengalamannya sewaktu menangani pasien ibu hamil. Pasiennya ngidam sepanjang kehamilan dan tiga hari terpaksa diinfus. "Saya mengajak pasien berpikir yang indah-indah, yang membuat ia merasa nyaman. Saya mengajaknya ke tempat yang tenang, jalan-jalan di bawah pohon-pohon. Ternyata seiring dengan itu, perasaan mualmualnya mulai berkurang". Kala itu, saya belum mempunyai pengetahuan tentang ANC Hipnoterapi. Saya sangat tertarik dengan inovasi ini".

Saat ini kegiatan sudah memasuki persiapan pelaksanaan langkah ketiga yakni *capacity*

building. Memperkaya pengetahuan dan keterampilan bidan dan petugas layanan di 10 Puskesmas tentang ANC Hipnoterapi. Pelatihan dilakukan dengan metodologi partisipatif, melibatkan peserta secara aktif, belajar dari inovasi yang sudah ada, merefleksikan pengalaman untuk menghasilkan pengetahuan baru, inovasi baru.

Tahun ini PT Vale Indonesia Tbk, pada program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, telah merancang program Rumah Sehat dengan salah satu unit layanannya adalah menyediakan pelayanan ANC Hipnoterapi kepada ibu hamil dan ibu melahirkan. Kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat PT Vale, dengan kemitraan ini, telah integratif dengan isu SDGs ke dalam implementasi kegiatannya.

Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, adaptasi inovasi pelayanan publik dengan melibatkan sektor swasta merupakan pengalaman pertama. Pembelajaran baik yang diperoleh ini akan menjadi rujukan untuk melakukan scale up inovasi pelayanan publik di Sulawesi Selatan.

Dukungan PT Vale Indonesia Tbk diharapkan tidak hanya mengadaptasi inovasi kategori kesehatan saja, tetapi juga inovasi-inovasi lainnya. Keberhasilan adaptasi inovasi ini diharapkan semakin menginspirasi semua sektor swasta untuk berkontribusi pada perbaikan dan penyebarluasan pelayanan publik, khususnya dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, dan menurunkan angka stunting di Sulawesi Selatan.

JIPP Sulsel, Efektif Tumbuhkan Inovasi Pelayanan Publik

emenjak tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah membuka kesempatan bagi Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD untuk berpartisipasi pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).

Sayangnya Provinsi Sulawesi Selatan belum terlalu terlibat di dalamnya karena belum banyak inovasi yang dilakukan, yang ikut baru Pemerintah Kota Makassar, Kabupaten Pinrang, Pangkep dan Barru saja. Kompetisi yang dibuka tiap tahun ini merupakan ajang tingkat nasional menjaring, menyeleksi, menilai dan memberikan penghargaan inovasi penyelenggaraan



Kelas Perahu, salah satu inovasi bidang pendidikan dari Kabupaten Pangkep. Foto: Yusuf Ahmad/KOMPAK

pemerintahan. Kompetisi nasional ini berupaya untuk terus mendorong tumbuhnya jiwa kompetitif bagi ASN untuk menghasilkan inovasi pelayanan publik yang bisa menjawab permasalahan pelayanan publik di wilayahnya.

Berdasarkan data inovasi Sulawesi Selatan, selama tiga tahun (2014-2016), hanya 5 (lima) kabupaten/kota yang berhasil masuk TOP 99, yaitu Barru, satu inovasi, Pinrang lima inovasi, Pangkep satu inovasi, Sinjai satu inovasi, dan Makassar dua inovasi.

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi inovasi pelayanan publik mengikuti kompetisi adalah belum terbangunnya mekanisme pembelajaran dan pembimbingan di tingkat provinsi, sehingga informasi dan kesempatan untuk mengikuti kompetisi hanya sampai kepada kabupaten/kota yang memiliki akses informasi langsung ke pemerintah pusat saja. Faktor lainnya, lemahnya

komitmen dan *leadership* pimpinan untuk memfasilitasi staf dalam menemukenali masalah apa yang akan diselesaikan melalui inovasi serta lemahnya kemampuan inovator mendokumentasikan pengalaman inovasinya.

Hingga Tahun 2017-2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendapat kesempatan bekerjasama dengan KemenPANRB dan Pemerintah Republik Federal Jerman untuk Proyek Kerjasama Indonesia-Jerman (GIZ) dengan Program TRANSFORMASI. Salah satu ikon program yang dilaksanakan adalah pembangunan knowledge hub, dengan salah satu produknya adalah platform online Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP), berupa situs interaktif yang berisi kompilasi inovasi pelayanan publik terpilih dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan, atau disebut JIPP Sulsel. JIPP merupakan simpul kerjasama antar lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan

35 | BaKTINews No. 172 Juni - Juli 2020

Faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi inovasi pelayanan publik mengikuti kompetisi adalah belum terbangunnya mekanisme pembelajaran dan pembimbingan di tingkat provinsi, sehingga informasi dan kesempatan untuk mengikuti kompetisi hanya sampai kepada kabupaten/kota yang memiliki akses informasi langsung ke pemerintah pusat saja

inovasi pelayanan publik. Jaringan Inovasi Pelayanan Publik terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan.

Pembentukan JIPP Sulsel diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan didukung oleh TRANSFORMASI-GIZ, KOMPAK dan Yayasan BaKTI. Adapun tujuan pembangunan JIPP adalah memfasilitasi pertukaran pengetahuan, wadah pengembangan kapasitas penyelenggara pelayanan publik, memfasilitasi percepatan inovasi pelayanan publik, monitoring dan pengembangan mekanisme review dan indeks kinerja, dan sebagai wadah umpan balik serta memberikan akses kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik.

Kehadiran JIPP Sulsel memberikan harapan besar bagi penyelenggara pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan inovatif. Pasalnya, Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 yaitu Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter. Pelaksanaan JIPP Sulsel didukung dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 89/I/Tahun 2018.

Kini berkat JIPP Sulsel, inovasi pelayanan publik mulai bertumbuh. Proses mencipta, mengadaptasi dan menjamin keberlanjutannya didukung oleh komitmen dan regulasi. Peran provinsi dalam melakukan bimbingan, pendampingan dan memfasilitasi kabupaten/kota dalam menghasilkan inovasi pelayanan publik berjalan efektif. Jumlah kabupaten/kota yang menghasilkan inovasi meningkat, tersebar sampai 21 kabupaten/kota.

Jumlah inovasi yang berhasil masuk TOP 99 juga meningkat. Tahun 2017, berjumlah 7 inovasi dan menjadi 8 inovasi di tahun 2018, serta 5 inovasi diantaranya masuk TOP 40. Inovasi ANC Hipnoterapi (Dinas Kesehatan-Luwu Utara) dan Kelas Perahu (Dinas Pendidikan-Pangkep), merupakan dua inovasi masuk nominasi pada ajang kompetisi tingkat dunia UNPSA (United Nation Public Cervices Award) tahun 2019.

Selama tiga tahun (2018-2020) ini JIPP Sulsel menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. JIPP Sulsel berhasil menjadi wadah saling belajar, menjadi daya pendorong semangat berinovasi di Sulawesi Selatan. Berbagai penghargaan tingkat nasional telah diterima sebagai bukti keberhasilan pemanfaatan JIPP untuk perbaikan pelayanan publik.

Geliat Inovasi bukan semata untuk kepentingan kompetisi. Penyelenggara pemerintahan terus ditantang untuk menghasilkan terobosan baru dalam merespon permasalahan pelayanan publik. Inovasi menjadi pilihan untuk menyelesaikannya. Untuk mendukungnya, pemerintah menyiapkan Surat Edaran Gubernur nomor 067/1783/B.Ortala tentang pelaksanaan Gerakan One Agency One Innovation. Regulasi ini ditingkatkan statusnya menjadi Peraturan Gubernur tentang Inovasi Daerah. Kebijakan ini menjadi jaminan untuk terus menciptakan inovasi, melakukan adaptasi dan menyebarluaskan dampaknya ke berbagai wilayah. Pelembagaan JIPP dapat memperkuat pencapaian visi pemerintah sehingga Sulawesi Selatan dapat menjadi pusat inovasi di Kawasan Timur Indonesia.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Penulis adalah Provincial Advisor TRANSFORMASI Sulawesi Selatan dan dapat dihubungi lewat Email: **fadiah07@yahoo.com**



ada tanggal 15 Juli 2019, dalam pidato pertamanya sejak terpilih kembali sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyatakan prioritas program kerjanya secara jelas "Kami ingin menempatkan prioritas kami pada pengembangan modal manusia. Pengembangan modal manusia adalah kunci untuk masa depan Indonesia."

Di Indonesia, kondisi modal manusia saat ini, pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan serta kesehatan yang dimiliki seseorang sepanjang hidup mereka, perlu mendapat perhatian yang besar. Skor Indonesia pada Human Capital Index tahun 2018 adalah 0,53. Ini berarti, secara rata-rata, seorang pekerja Indonesia pada generasi mendatang hanya akan memiliki produktivitas sebesar 53 persen dari potensi penuhnya bila ia menyelesaikan pendidikan dan memiliki akses penuh terhadap kesehatan. Walaupun seorang anak Indonesia hari ini secara umum akan menyelesaikan pendidikan selama 12,3 tahun saat ia berusia 18 tahun, secara rata-rata ia hanya akan menerima pembelajaran setara 7,9 tahun sekolah karena rendahnya mutu pendidikan. Selain itu, hampir sepertiga anak-anak Indonesia mengalami stunting, yang berarti mereka berisiko mengalami keterbatasan kognitif dan fisik seumur hidup.



Komitmen pemerintah Indonesia dan kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pengembangan modal manusia telah membawa perbedaan yang besar. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah telah mengalokasikan sumber daya yang besar dan menerapkan beberapa program untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Walau Indonesia terus belajar dari keberhasilan negara lain, seperti pengurangan *stunting* di Peru, peningkatan capaian pembelajaran di Vietnam, dan program perlindungan sosial yang sukses di Meksiko dan Filipina, Indonesia juga bisa melihat kisah sukses program pengembangan modal manusia dari negara sendiri. Komitmen Indonesia untuk mengatasi

stunting secara serius dan tersebar luas membuat negara-negara lain mulai datang untuk melihat dan belajar secara langsung. Hanya beberapa minggu yang lalu, pemerintah menerima rekan-rekan dari India, Bhutan dan Sri Lanka untuk belajar tentang upaya pengurangan stunting juga bagaimana menerapkan dan mengawasi semua konvergensi, koordinasi dan reformasi manajemen yang diperlukan untuk mengatasi masalah stunting yang kompleks.

Program stunting menyoroti pentingnya kepemimpinan dan komitmen di semua tingkat pemerintah, dan bagaimana koordinasi program dan sumber daya berbagai lembaga pemerintah membantu keluarga dan anak-anak menerima semua layanan yang mereka butuhkan untuk memaksimalkan modal manusia mereka.

Saya beruntung dapat menyaksikan bagaimana program ini membawa perbaikan untuk anak-anak yang lahir dan tumbuh dewasa hari ini. Beberapa minggu yang lalu, saya bertemu dengan Ibu Ifa, seorang Kader Pembangunan Manusia di Desa Tangkilsari di Jawa Timur. Tugasnya adalah bekerjasama dengan desa-desa setempat untuk menutup kesenjangan layanan yang bisa menyebabkan stunting. Hanya dalam satu tahun, Desa Tangkilsari memiliki lebih dari dua kali lipat jumlah Dana Desa yang dialokasikan secara khusus untuk kegiatan pengurangan stunting, dari 35 juta rupiah pada 2018 menjadi 78,2 juta rupiah pada 2019. Dana tersebut dipakai untuk memberi makanan tambahan bagi ibu hamil dan bayi, kelas gizi, dan biaya untuk Kader Pembangunan Manusia seperti Ibu Ifa dan guru PAUD. Desa Tangkilsari sudah melihat peningkatan yang signifikan dalam tingkat pertumbuhannya: pada tahun 2018, 39 anak di bawah usia 5 tahun mengalami stunting, sedangkan pada tahun 2019 turun menjadi 25 anak.

Tahun lalu, saya bertemu dengan Ibu Nur, Kader Pembangunan Manusia di Desa Dakung, Lombok. Ia juga telah banyak

melakukan kegiatan yang mengesankan untuk membantu banyak keluarga guna memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terhambat pertumbuhannya. Hanya dalam enam bulan, ia bekerja dengan kepala desa untuk memastikan bahwa 50 sambungan air dibangun dan bahwa total Dana Desa sebesar 253 juta rupiah dialokasikan untuk mendukung keluarga yang berisiko terhambat pertumbuhannya. Ibu Ifa dan Ibu Nur, keduanya memainkan peran penting dalam strategi nasional pemerintah untuk mempercepat pencegahan stunting. Diluncurkan pada tahun 2017 dengan menyatukan 23 kementerian di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden, strategi ini berfungsi sebagai model untuk menutup kesenjangan modal manusia di Indonesia.

Presiden Jokowi benar ketika beliau menyatakan bahwa pengembangan modal manusia menjadi kunci masa depan Indonesia. Sementara itu, program stunting menunjukkan kemungkinan apa yang dapat dicapai. Sekarang saatnya untuk juga menangani, dengan tingkat komitmen, koordinasi dan kemitraan yang sama, krisis pembelajaran yang sulit dihilangkan di Indonesia dan mutu hasil kesehatan yang belum merata. Peningkatan sistem pendidikan dasar dan kejuruan akan menjadi kunci bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia di masa depan. Dengan peningkatan pada sektor tersebut, diharapkan agar generasi muda Indonesia lulus dengan keterampilan yang tepat untuk Industri 4.0 dan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bersaing demi pekerjaan yang baik.

Untuk mencapainya, perlu fokus pada peningkatan pembelajaran siswa. Inisiatif Kualitas Pendidikan Nasional dapat dikaitkan dengan penguatan sistem penilaian pembelajaran siswa, dan mencakup data pengeluaran terkait sektor pendidikan di semua tingkat pemerintah untuk mempromosikan transparansi, efektivitas, dan efisiensi pada sektor ini. Pada bidang kesehatan, peningkatan pajak tembakau akan memiliki manfaat kesehatan langsung, dan pemasukan tersebut bisa dipakai untuk memperkuat layanan kesehatan preventif dan menerapkan sistem perlindungan sosialyang kuat.

Terdapat banyak bukti global yang menunjukkan bahwa investasi untuk menutup kesenjangan modal manusia bersifat produktif dan menunjukkan hasil yang signifikan. Di Nigeria, pendapatan pekerja naik 10 persen dalam beberapa minggu setelah berpartisipasi dalam program pengujian dan pengobatan malaria. Di Kenya, program pemberantasan penyakit cacingan menyebabkan berkurangnya absensi sekolah untuk anak-anak dan peningkatan pendapatan pekerja dewasa sebesar 20 persen. Di Indonesia, sebuah penelitian menemukan bahwa anak-anak Indonesia yang mengalami stunting pada tahun 1993 menunjukkan fungsi kognitif yang lebih rendah sebagai orang dewasa muda pada tahun 2014-2015, mengalami pendidikan formal yang lebih singkat, juga memiliki pendapatan yang lebih rendah saat dewasa. Diperkirakan jika Indonesia bisa menutup kesenjangan antara skor Human Capital Index saat ini dan skenario ideal kesehatan penuh dan pendidikan pada tingkat 4 persen per lima tahun, nilai tengah rata-rata di antara negara-negara dalam basis data, perkiraan PDB per kapita akan menjadi 7,1 persen lebih tinggi pada tahun 2050¹.

Menutup kesenjangan modal manusia berarti bahwa akan terdapat lebih banyak anak Indonesia terlahir sehat, siap untuk belajar saat mulai sekolah, mampu memaksimalkan apa yang mereka pelajari, mendapat pekerjaan yang lebih baik, dan tetap sehat sepanjang hidup mereka. Secara keseluruhan, pencapaian ini akan memberi semua orang Indonesia kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi diri mereka sendiri, keluarga mereka, masyarakat mereka, dan bagi generasi mendatang.

¹ Hasil-hasil ini berdasarkan model situasi ekonomi yang ada dalam paper berikut: Collin, Matthew Edward; Weil, David Nathan. 2018. The Effect of Increasing Human Capital Investment on Economic Growth and Poverty: A Simulation Exercise (English). Policy Research working paper; no. WPS 8590. Washington, D.C.: World Bank Group.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Artikel ini bersumber dari https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/pengembangan-modal-manusia-adalah-kunci-masa-depan-indonesia

Diskusi Online di BaKTI

Di masa pandemi COVID-19, Yayasan BaKTI tetap melaksanakan kegiatan pertukaran pengetahuan tentang program-program pembangunan yang sedang berlangsung di kawasan timur Indonesia. Kegiatan pertukaran pengetahuan tetap dijalankan secara online dengan mengaktifkan penggunaan channel media sosial yang dimiliki BaKTI

Kegiatan pertukaran pengetahuan yang dijalankan secara *online* melalui *Live* di Instagram *Story* @InfoBaKTI selama bulan Juni adalah sebagai berikut.

Cerita Praktik Cerdas

Setiap Rabu, pukul 14:00 - 14:30 WITA

Cerita Praktik Cerdas adalah acara berbagi inspirasi bersama para praktisi Praktik Cerdas BaKTI. Acara ini selain berbagi tentang apa yang keren dari sebuah praktik cerdas, juga secara khusus mengangkat inisiatif-inisiatif baru yang dilakukan oleh praktisi Praktik Cerdas.

Pada bulan Juni, BaKTI telah melakukan interview dengan:

- Bapak Lalu Supratman, inisiator Bumdes Pengelolaan Air di Lendang Nangka. Beliau berbagi cerita mengenai perkembangan Bumdes Lentera Desa Lendang Nangka di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Hingga Mei 2020 pelanggannya mencapai 981 kepala keluarga dari 6 dusun di Desa Lendang Nangka dan 45 persen keuntungan Pamdes digunakan untuk pemeliharaan masiid.
- Bapak Ottow Geisler Sineri, berbagi informasi perkembangan Praktik Cerdas Membangun dengan Data di Papua dan Papua Barat. Beliau berbagi tentang berbagai perkembangan dari Sistem Administrasi dan Informasi Kampung (SAIK) dan Sistem Administrasi dan Informasi Distrik (SAID) dalam membantu pemerintah dalam merencanakan prioritas pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat di Papua dan Papua Barat.
- Ibu Marlinda Nau, praktisi praktik cerdas Lakoat. Kujawas. Beliau berbagi pengalaman dan cerita menginspirasi dengan menjadi warga aktif di Komunitas Lakoat. Kujawas. Berbagai perkembangan kegiatan yang telah dilakukan di Lakoat. Kujawas yang mengintegrasikan kegiatan kewirausahaan sosial dengan kegiatan perpustakaan dan ruang kesenian yang melibatkan anak-anak, remaja, bapak-bapak dan mama-mama di Mollo sebagai warga aktif yang menggerakkan komunitas.

Cerita Positif di Masa Pandemi

Setiap Kamis, pukul 14:00 - 14:30 WITA

Cerita Positif di Masa Pandemi adalah acara yang mengangkat beragam inisiatif menginspirasi, yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun komunitas dalam menghadapi beragam tantangan yang terjadi di masa pandemi. BaKTI memulai dengan mengangkat pengalaman mitra dan *stakeholder* dari programprogram yang dikelola BaKTI.

Di bulan Juni, melalui acara ini BaKTI telah melakukan interview dengan:

- Diskusi "Pangan, Tanah dan Masyarakat" bersama Ester Elisabeth Umbu Tara, Alumni Program INSPIRASI 2018, Penulis dan Fotografer.
- Diskusi "Pencegahan Perkawinan Anak, Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda" bersama Hendriyadi dan Derry Fahrizal Ulum dari UNICEF Indonesia.
- Diskusi "Pencegahan Pelecehan Seksual Anak di Sekolah" bersama Andi Arifayani, Alumni Program INSPIRASI 2018 dan Staf LemINA.
- Diskusi "The Power of Women's Stories" bersama Serlinia Rambu Anawoli, Alumni Program INSPIRASI 2018 dan Sekretaris Cabang Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Kota Kupang.

Occasional Live Story dan Instagram TV (IGTV)

Selama pelaksanaan kegiatan pertukaran pengetahuan online melalui media sosial ini, BaKTI menerima cukup banyak masukan dari audiens. Beberapa di antaranya adalah untuk mengangkat topik spesial atau melakukan interview dengan narasumber tertentu. Beberapa topik dan interview spesial yang telah diangkat antara lain sebagai berikut.

- Diskusi "Monolog Luna: Papua" bersama Luna Vidya, Fasilitator Komunikasi Kreatif (*Live Story* Instagram).
- Interview Eksklusif BaKTI "Jejak Kesan Kenangan di Kawasan Timur Indonesia" bersama Richard Mathews, Konsul-Jenderal Australia di Makassar (*Live Story* Instagram).
- Diskusi "Milenial Mencegah Perkawinan Anak" bersama Ira Husain, Program Manager Institute of Community Justice (Live Story Instagram).
- Diskusi "Shelter Warga, Merawat Kepedulian Masyarakat" bersama Nurqalbhi Angraeni Lukman, Relawan Sherlter Warga Bangkala Kota Makassar (*Live Story* Instagram).
- Diskusi "Gotong Royong Pendidikan di Pelosok Indonesia" bersama Caroline Tupamahu, Lead Program Manager KIAT Guru.
- Diskusi "Respon Daerah untuk Tatanan Baru: Dampak COVID-19 di Bone Sulawesi Selatan" bersama Muliani Ratnaningsih, Research Officer Tulodo.

BaKTI's Corner

Hadir di Perpustakaan Kota Makassar

ang itu di tengah kesibukan tim BaKTI mengepak barang-barang, mengemas peralatan kantor untuk dibawa ke gedung kantor baru, kami menyempatkan untuk mengadakan serah terima beberapa aset dan buku-buku perpustakaan BaKTI kepada perwakilan perpustakaan Kota Makassar.

Bertempat di kantor BaKTI pada Jumat 19 Juni 2020, sebanyak 2.259 judul, 2.361 eksemplar dan 6 aset yang terdiri dari 3 rak buku, 1 lemari buku dan 2 information Kiosk serta buku diserahkan oleh Bapak Muhammad Yusran Laitupa selaku Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI kepada Kepala Bidang Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Makassar, Ibu Indra Artati.

Serah terima ini dilaksanakan sebagai bentuk dukungan BaKTI untuk peningkatan layanan perpustakaan Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Lamadukelleng ini. Harapannya melalui bantuan ini dapat mendukung kelancaran kegiatan Perpustakaan Kota khususnya terkait pertukaran ilmu pengetahuan sebagaimana juga yang menjadi marwah BaKTI.

Mulai bulan Juli 2020 Kantor BaKTI yang sebelumnya berlokasi di Jl. Mappanyuki No. 32 akan pindah ke kantor baru yang berjarak kurang lebih 1 km ke arah selatan kota tepatnya di Jl. Dg. Ngeppe No. 10/1. Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dengan berat hati disampaikan bahwa di kantor baru ini nantinya, perpustakaan BaKTI tidak dapat lagi memberikan layanan seperti sebelumnya dikarenakan keterbatasan ruang.

Olehnya dengan diserahkannya bantuan bukubuku kepada Perpustakaan Kota Makassar, Sahabat BaKTI yang selama ini mengakses buku dan publikasi di BaKTI tidak khawatir jika perlu mencari bahan referensi untuk penelitian atau kajian, karena di Perpustkaan Kota Makassar akan tersedia BaKTI's Corner. BaKTI's Corner ini akan menyediakan layanan buku, jurnal, publikasi serta koneksi internet sama dengan di perpustakaan BaKTI sebelumnya.

Buku dan rak dari perpustakaan Yayasan BaKTI ini rencana akan ditempatkan di lantai II dengan *space* tersendiri. Harapannya agar pengunjung yang ingin mendapatkan buku yang bersumber dari perpustakaan Yayasan BaKTI dapat langsung ke tempat yang disediakan.



Kabid Pengembangan Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan didampingi Pustakawan menerima bantuan dari Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI

Foto: Dok.Perpustakaan Kota Makassar

"Jadi Perpustakaan Kota Makassar akan diperkuat dengan fungsi penelitian dan praktik cerdas karena buku-buku BaKTI berisi literatur untuk mendukung penelitian dan inovasi baik bagi mahasiswa, komunitas maupun masyarakat umum,"ujar M. Yusran Laitupa.

"Harapannya agar para peneliti baik mahasiswa, komunitas maupun masyarakat yang ingin mendapatkan buku yang bersumber dari perpustakaan Yayasan BaKTI dapat langsung ke tempat yang disediakan," kata Indra Artati.

Jika Sahabat BaKTI ingin mengakses buku, jurnal dan publikasi perpustakaan BaKTI dapat mengunjungi Perpustakaan Kota Makassar yang berlokasi di Jl. Lamadukelleng No. 03 lantai 2.

Kami percaya bahwa kerja-kerja pertukaran pengetahuan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Perpustakaan buku secara fisik tak lagi dikelola oleh BaKTI, namun BaKTI percaya ada semangat dan energi yang terus bertumbuh untuk terus mengelola perpustakaan dalam bentuk penyediaan informasi, pengetahuan dan pembelajaran yang dapat diakses setiap saat melalui berbagai *platform* media yang dikelola oleh Yayasan BaKTI.

Terimakasih kami sampaikan kepada Sahabat BaKTI dan para donator buku yang selama ini turut berkontribusi menjadi bagian penting dan tak terpisahkan dari kegiatan pertukaran pengetahuan melalui perpustakaan BaKTI.